

BUKU 1

**ANALISIS STRATEGIS
SMART CITY
KOTA MADIUN**

2019 - 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
1. ANALISIS MASA DEPAN	1
1.1. Kondisi Umum Daerah	1
1.1.1. Wilayah	1
1.1.2. Demografi	5
1.2. Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat <i>Stakeholder</i> Daerah	9
1.3 Analisis Daya Saing Kota Madiun Terhadap Daerah Lain.....	11
1.4 Analisis Kelembagaan, dan Relevansinya Terhadap Stakeholder	13
2. ANALISIS KESIAPAN DAERAH	16
2.1 Analisis Nature (Faktor Anugrah Sumber Alam)	16
2.2. Analisis Culture Daerah	22
2.3. Analisis Struktur	23
2.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia (people).....	23
2.3.2. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (<i>managerial</i>).....	27
2.3.3. Kapasitas Keuangan Daerah (<i>capital</i>).....	29
2.4. Analisis Infrastruktur	30
2.4.1. Fisik	30
2.4.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	32
2.4.3. Sosial.....	37
2.5. Analisis Suprastruktur	38
3. ANALISIS GAP	41
Analisis Gap Smart Governance.....	41
Analisis Gap Smart Economy	43
Analisis Gap Smart Branding	46
Analisis Gap Smart Living	51
Analisis Gap Smart Society	56
Analisis Gap Smart Environment.....	61

4.	ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY	68
4.1.	Sasaran Smart City Daerah.....	70
	Sasaran Smart Governance	70
	Sasaran Smart Economy	70
	Sasaran Smart Branding.....	71
	Sasaran Smart Society.....	71
	Sasaran Smart Living.....	72
	Sasaran Smart Environment	72
4.2	Analisis Visi Pembangunan Daerah.....	73
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019.....	74
4.2.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2020.....	74
4.2.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021.....	74
4.2.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022.....	74
4.2.5.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023.....	74
4.2.6.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024.....	74
4.2.7.	Program Pembangunan Kota Madiun	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Madiun	4
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Madiun dan Cakupan Wilayah Kajian.....	7
Gambar 1.3 Musrenbang Kota Madiun tahun 2019	11
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun.....	14
Gambar 2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030	17
Gambar 2.2 Pola Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030	17
Gambar 2.3 Persentase Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Madiun (hektar) tahun 2017 ..	21
Gambar 2.4 Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Jalan (km) di Kota Madiun tahun 2015-2017	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Madiun	1
Tabel 1.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Madiun	2
Tabel 1.3 Saluran Drainase di Wilayah Kota Madiun	3
Tabel 1.4 Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan.....	5
Tabel 1.5 Jumlah penduduk dan kepadatannya 5 tahun terakhir.....	8
Tabel 1.6 Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun	8
Tabel 2.1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Madiun.....	21
Tabel 2.2 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Madiun	21
Tabel 2.3 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak tahun 2017	22
Tabel 2.4 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas tahun 2017	22
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Rentang Usia tahun 2018	25
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017	26
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	26
Tabel 2.8 Data Jumlah Pegawai Setiap OPD berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	28
Tabel 2.9 Sumber Dana dan Besar Anggaran untuk Penerapan Smart City.....	29
Tabel 2.10 Jumlah Bangunan Sekolah di Kota Madiun tahun 2017	32
Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Madiun tahun 2017	32
Tabel 2.12 Kondisi Infrastruktur TI untuk Mendukung Smart City	32
Tabel 2.13 Daftar Aplikasi Kota Madiun tahun 2018	34
Tabel 2.14 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Madiun tahun 2013-2017	38
Tabel 2.15 Peraturan Terkait Pembangunan Smart City Kota Madiun	38
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024.....	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 PDRB Kota Madiun dan Sekitarnya	12
Grafik 1.2 PDRB tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku menurut Kota	13

Bab 1

ANALISIS MASA DEPAN



**Smart City
Kota Madiun**

Bab 1

ANALISIS MASA DEPAN



1.1. Kondisi Umum Daerah

1.1.1. Wilayah

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur bagian barat yang mempunyai letak strategis. Kota Madiun menjadi perlintasan transportasi darat utama antar Provinsi di pulau Jawa, diantaranya dilewati jalur Surabaya – Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – Madiun – Solo – Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang cukup strategis karena menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111°BT-112°BT dan 7°LS-8°LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Madiun di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan. Tinggi daratan. Kota Madiun terletak pada 63 meter hingga 67 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 0% - 2% atau dapat dikatakan relatif datar. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan.

Kota Madiun terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Madiun

Wilayah Administratif	Luas Wilayah (km ²) 2017
Kecamatan Manguharjo	10.04
Kecamatan Taman	12.46
Kecamatan Kartoharjo	10.73
Kota Madiun	33.23

Sumber : *Data BPS Kota Madiun*



Wilayah Kota Madiun terletak di lembah Sungai Madiun yaitu sekitar 30 km di sebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Oleh karenanya, kondisi seperti itu merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

Struktur geologi Kota Madiun sebagian besar termasuk jenis alluvium sedangkan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Kota Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur dari arah utara-selatan, menjadi dua bagian. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Untuk sumber air yang ada yaitu sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter.

Sebagai daerah tropis, Kota Madiun memiliki iklim yang sama dengan seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu musim kemarau sekitar bulan Mei hingga Oktober, dan mengalami musim penghujan antara bulan November hingga April. Suhu udara Kota Madiun berkisar antara 20°C – 35°C dengan kelembaban nisbi udara berkisar 78%. Curah hujan di Wilayah Kota Madiun memiliki lama hari hujan rata-rata tahunan sekitar 100 hari dan besarnya curah hujan 2.000 mm/tahun, berdasarkan pemantauan dari 4 stasiun pengamat hujan yaitu di Pabrik Gula Rejo Agung, Kantor Madiun, Klegen, dan Pabrik Gula Kanigoro.

Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo, dan dilintasi oleh Sungai Madiun sebagai sungai utama dengan anak sungai yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Sumber air Kota Madiun berasal dari sumber air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter, sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter. Sedangkan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berasal dari Sumber Air Ngrowo, Sumber Air Kapuas, Sumber Air pada Perumnas I dan II, serta PPAT dengan kedalaman rata-rata 100 m – 125 m.

Tabel 1.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Madiun



No	Nama Sungai	Luas (Ha)
1	DAS BENGAWAN SOLO	3323

Sumber: *Java Water Resources Strategic Study, 2012*

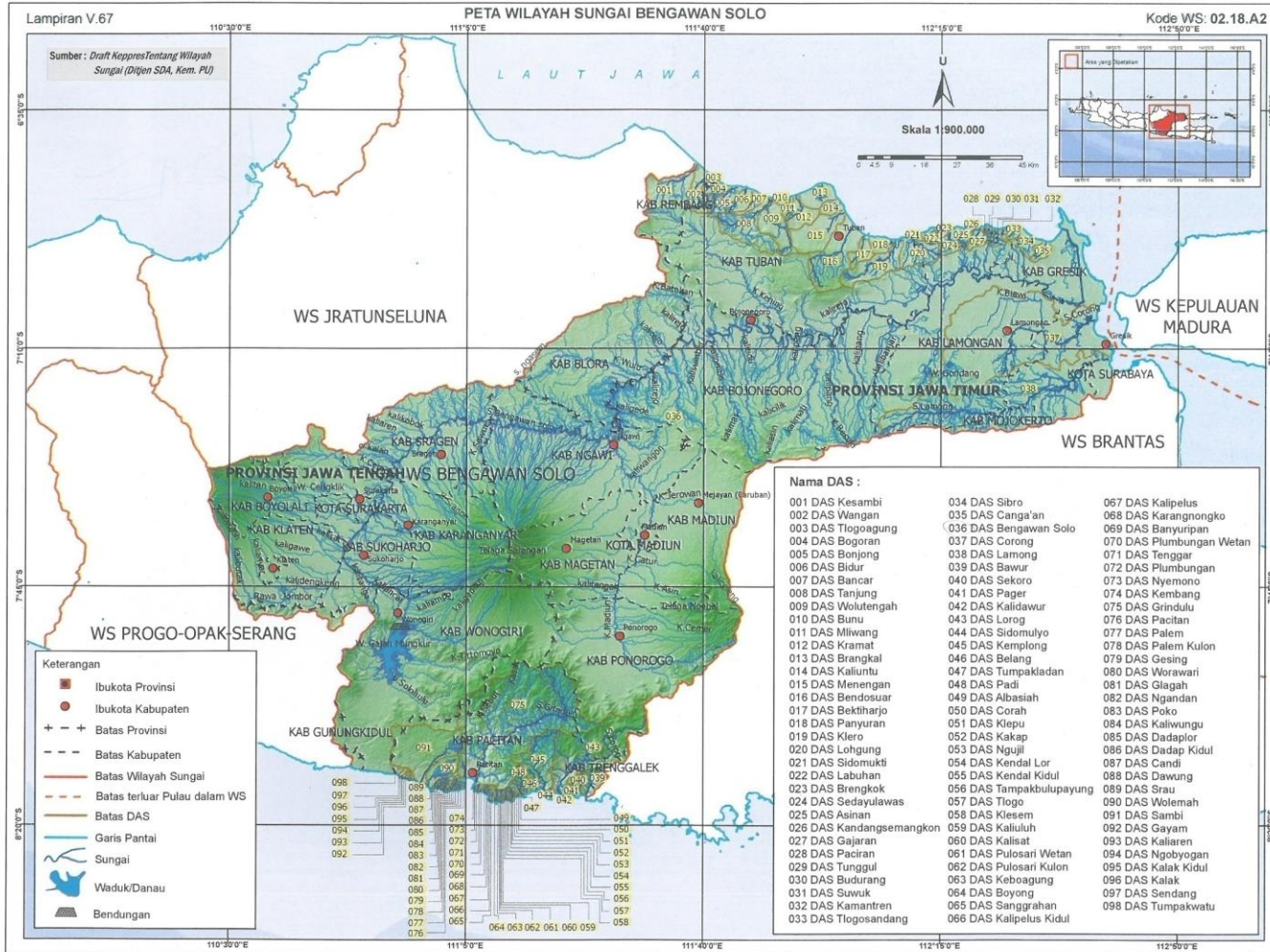
Tabel 1.3 Saluran Drainase di Wilayah Kota Madiun

No	Nama Saluran	Jenis Saluran	Panjang (Km)
1	Saluran Terate	Primer	10.631
2	Saluran Banjarejo	Primer	3.557
3	Saluran Manisrejo	Primer	4.310
4	Saluran Nila	Primer	0,912
5	Saluran Slarangan	Sekunder	2.735
6	Saluran Pilangbango II	Sekunder	1.693
7	Saluran Rejomulyo	Sekunder	1.602
8	Saluran Nambangan Kidul	Sekunder	1.601
9	Saluran Klegen	Sekunder	1.546
10	Saluran Madiun Lor	Sekunder	1.475
11	Saluran Kanigoro	Sekunder	1.470
12	Saluran Sono	Sekunder	1.362
13	Saluran Rejoagung	Sekunder	1.357
14	Saluran Mojorejo	Sekunder	1.091
15	Saluran Maling	Sekunder	1.032
16	Saluran Winongo II	Sekunder	0,902

Sumber: *Rencana Umum Sistem Drainase Kota Madiun 2003-2013*



Pembagian DAS pada WS Bengawan Solo
 Division of River Catchment Area within Bengawan Solo RBT



Gambar 1.1 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Madiun



Luas wilayah administratif Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km².

Tabel 1.4 Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah Administrasi		Luas Wilayah Terbangun	
			(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
1	Kec. Manguharjo	9	1004	30,21%	605,00	18,21%
2	Kec. Taman	9	1246	37,50%	1215,4	36,58%
3	Kec. Kartoharjo	9	1073	32,29%	633	19,05%
	Jumlah	27	3323	100,00%	2453,4	73,83%

Sumber: *Rencana Detil Tata Ruang Kota Madiun 2012*

Rata-rata suhu udara selama tahun 2017 di Kota Madiun adalah antara 23,60- 23,97 ° C. Penyinaran matahari paling tinggi persentasenya terdapat di bulan September sedangkan kecepatan angin paling besar terjadi di Bulan Agustus sebesar 70,69 knot.

Pengukuran curah hujan dilakukan di 4 (empat) stasiun. Masing-masing adalah Stasiun Kantor UPT, Stasiun PG Kanigoro, Stasiun PG Rejoagung dan Stasiun Klegen. Dari keempat stasiun tersebut, tercatat bahwa tidak ada hari hujan di Bulan Agustus 2017. Jumlah hari hujan terbanyak yaitu 22 hari, terjadi pada bulan Februari, tercatat di seluruh stasiun. Sementara itu rata-rata curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Klegen pada Bulan Februari sebesar 29,76 mm³/hari

1.1.2. Demografi

Jumlah Penduduk berdasarkan data pelayanan Dukcapil Kota Madiun pada Juni tahun 2019 adalah sebesar 210.331 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel di samping, dengan jumlah penduduk laki – laki = 102.946 jiwa, dan penduduk perempuan = 107.386 jiwa.

Namun berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, data kependudukan lainnya hanya ada sampai dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 69.552 jumlah KK. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk kota Madiun sampai dengan tahun



2017 adalah 0,53 %. Kepadatan penduduk yang tercatat sampai dengan tahun 2017 adalah 62,79.

Jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu di waktu yang akan datang dapat diperkirakan/diproyeksikan dengan menggunakan persamaan:

$$P_n = P_0(1+r)^n$$

dimana: P_n = jumlah penduduk tahun akhir

P_0 = jumlah penduduk tahun awal

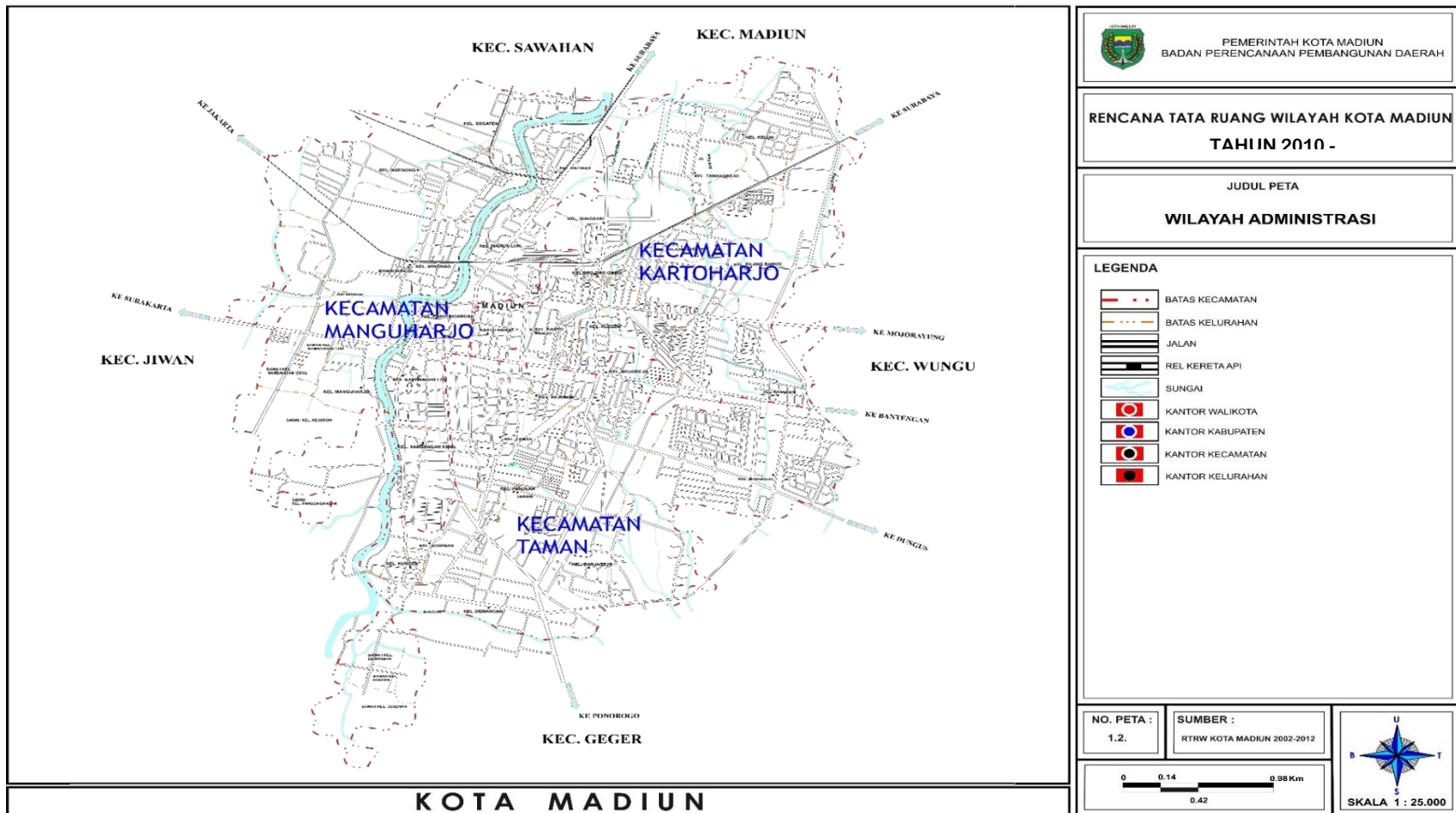
r = pertumbuhan penduduk

n = tahun perhitungan

Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kota Madiun tahun 2017 terdiri atas 43,82 persen atau 77.167 jiwa penduduk berusia 15-44 tahun, 20,94 persen atau 36.872 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 35,24 persen atau 62.060 jiwa berusia 45 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017, angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun sebesar 4,26, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 67,76 persen.





Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Madiun dan Cakupan Wilayah Kajian



Tabel 1.5 Jumlah penduduk dan kepadatannya 5 tahun terakhir

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah KK					Tingkat Pertumbuhan (%)					Kepadatan penduduk				
	Tahun					Tahun					Tahun					Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Kec. Manguharjo	55.277	55.412	55.682	60.804	60.712	19.952	19.952	19.943	20.031	20.101	8,00	0,24	0,49	8,80	-0,15	55,06	55,19	55,46	60,56	60,47
Kec. Taman	79.070	79.532	80.031	85.951	86.575	22.660	24.836	25.600	26.889	27.218	6,51	0,58	0,63	7,14	0,72	63,46	63,83	64,23	68,98	69,48
Kec. Kartoharjo	53.486	54.071	54.473	55.332	55.970	16.222	16.222	16.222	17.570	17.840	3,14	1,09	0,74	1,56	1,15	49,85	50,39	50,77	51,57	52,16
Jumlah	187.833	189.015	190.186	202.087	203.257	58.834	61.010	61.765	64.490	65.159	5,99	0,63	0,62	6,07	0,58	56,53	56,88	57,23	60,81	61,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Tabel 1.6 Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah KK					Tingkat Pertumbuhan					Kepadatan penduduk				
	Tahun					Tahun					Tahun					Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Kec. Manguharjo	60.860	61.009	61.157	61.307	61.456	20.287	20.336	20.386	20.436	20.485	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	60,62	60,77	60,91	61,06	61,21
Kec. Taman	87.079	87.587	88.097	88.610	89.126	29.026	29.196	29.366	29.537	29.709	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	69,89	70,29	70,70	71,12	71,53
Kec. Kartoharjo	56.385	56.802	57.223	57.647	58.074	18.795	18.934	19.074	19.216	19.358	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	52,55	52,94	53,33	53,72	54,12
Jumlah	204.324	205.397	206.477	207.564	208.656	68.108	68.466	68.826	69.188	69.552	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	61,49	61,81	62,14	62,46	62,79

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun diolah



1.2. Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat *Stakeholder* Daerah

Dalam proses pembangunannya, kota Madiun memiliki tantangan yang harus dihadapi. Bencana angin puting beliung dan banjir yang melanda setiap tahunnya di Kota Madiun, serta berbagai ancaman, tantangan dan kelemahan, memberikan dampak perilaku tersendiri terhadap masyarakat. Bahkan kalau dikaji dari sejarah, berdirinya Pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Di wilayah Kota Madiun terdapat 2 (dua) kelurahan yang dahulu kala pada masa Pemerintahan Kesultanan Mataram kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan Taman dan Kuncen.

Jauh sebelumnya, (Sumber : <https://madiunkota.go.id/sejarah-kota-madiun/>) pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun selatan terdapat kerajaan / pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya terakhir. Selanjutnya dengan pertimbangan geografis dan ekonomis pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir bengawan Madiun, yang dinamakan Kutho Miring di wilayah kelurahan Demangan sekarang dan kemudian pindah lagi ke kompleks Rumah Dinas Bupati Madiun sekarang ini.

Pada masa pemerintahan Kutho Miring tersebut, di wilayah Kabupaten Sawo Ponorogo terdapat pemberontakan kepada Kerajaan Mataram. Akhirnya Bupati Madiun yang merupakan Bupati Mancanegara timur (dengan gelar RONGGO) yang wilayah kerjanya juga meliputi daerah Sawo Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan pemberontakan tersebut.

Pada masa kepemimpinan RONGGO ke II yang bergelar RONGGO PRAWIRODIRDJO inilah, lahir pahlawan Nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai Senopati Perang, Pangeran Diponegoro yang bernama ALI BASAH SENTOT PRAWIRODIRDJO. Sebelum meletus perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832 Madiun secara resmi dikuasai oleh Pemerintahan Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan Pemerintahan yang berstatus KARESIDENAN dengan ibukota di Desa Kartoharjo (tempat istana Patih Kartoharjo) yang berdekatan dengan istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan.

Sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi di Kandangan dan tembakau di Pilangkenceng dan lain-lain dan mereka bermukim di dalam kota disekitar Istana Residen Madiun.



Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di kota Madiun, karena statusnya yang merasa superior berusaha untuk melaksanakan segregasi (pemisahan) sosial, berdasarkan perundang-undangan Inland-sche Gementee Ordonantie, oleh departemen Binnen-landsch, dibentuk Staads Gementee Madiun atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan berdasarkan Staatsblaad tahun 1918 nomor 326.

Tentunya berbagai latar belakang sejarah di atas, akan memberikan pengaruh dan perubahan pada pola kehidupan masyarakat di Kota Madiun. Kota Madiun merupakan salah satu kota yang berada di ujung sebelah barat wilayah provinsi Jawa Timur. Kota Madiun terletak pada jalur lintas wilayah selatan pulau Jawa dari arah Jawa Barat dan Jawa Tengah menuju Jawa Timur atau sebaliknya. Keadaan tersebut membuat Kota Madiun dikenal dan oleh wisatawan dijadikan sebagai Kota Transit.

Berdasarkan gambaran posisi atau letak tersebut nampak bahwa Kota Madiun menyimpan potensi menjadi pusat pengembangan terutama pengembangan bidang perekonomian. Selain itu Kota Madiun juga disiapkan untuk menjadi destinasi yang tak kalah semarak dengan kota-kota Pariwisata lainnya di Indonesia dan juga dalam kench Internasional. Hal inilah yang mendasari dibuatnya tagline baru untuk Kota Madiun yaitu **Kota Karismatik Madiun** atau **The Charismatic City Madiun**. Definisi tersebut diperlukan Kota Madiun sebagai citra branding yang positif, menarik perhatian masyarakat, selaras dengan kepribadian Madiun yang berani dan percaya diri.

Untuk memahami harapan masyarakat, pemerintah Kota Madiun, telah membuka kran akses informasi seluas-luasnya, yang diawali dengan cara mengadakan musrenbang. Melalui kegiatan musrenbang, Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota Madiun mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan, serta mendapatkan informasi dari OPD dengan menggunakan aplikasi Madiun Karismatik.





Gambar 1.3 Musrenbang Kota Madiun tahun 2019

Melalui keterbukaan akses informasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan harapannya, yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai bentuk **“revolusi mental”**, serta telah memberikan perubahan kepada para penyelenggara dan *stakeholder* di Kota Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi potensi penting dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang *smart*.

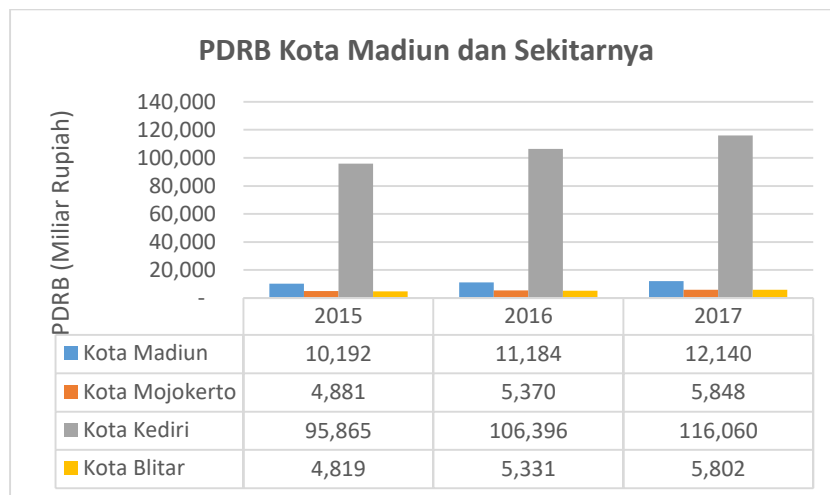
1.3 Analisis Daya Saing Kota Madiun Terhadap Daerah Lain

Pada kajian analisis daya saing, dilihat dari daerah di sekitar Kota Madiun dan daerah lain tertentu yang memiliki potensi, kelemahan dan daya gerak yang memungkinkan dijadikan sebagai pembanding. Daerah sekitar wilayah Kota Madiun adalah Kota Mojokerto, Blitar, dan Kediri.

Kajian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar yang harga berlaku, Kota Madiun masih lebih unggul daripada Kota Mojokerto dan Blitar, tetapi masih di bawah Kota Kediri. Selengkapnya sebagaimana pada grafik berikut.



Grafik 1.1 PDRB Kota Madiun dan Sekitarnya



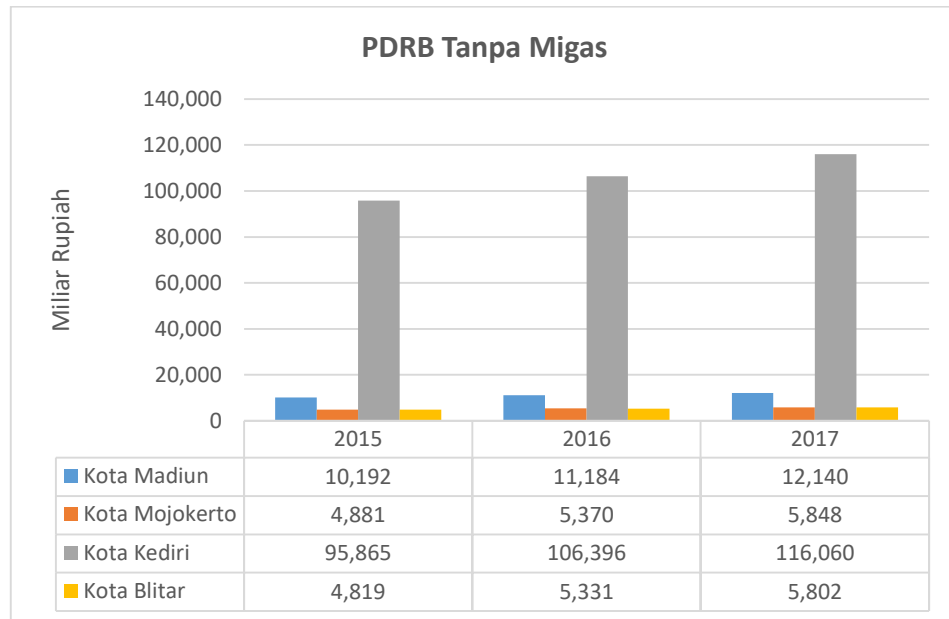
Sumber : *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut lapangan usaha 2013-2017, Katalog BPS . 9302008.35*

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa posisi Kota Madiun dibandingkan dengan daerah sekitar memiliki prospek dan daya saing yang baik. Hal ini karena apabila dibandingkan dengan Kota Mojokerto yang dikenal sebagai kota budaya, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan (budiparindra) dan Kota Blitar, Kota Madiun hingga tahun 2017 masih memiliki PDRB diatas kota-kota tersebut. Namun apabila dibandingkan dengan Kota Kediri yang secara geografis berada lebih ke timur serta memiliki arah dalam hal pengembangan jasa perdagangan, Kota Madiun memiliki PDRB yang jauh lebih rendah.

Selanjutnya berdasarkan PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku, posisi Kota Madiun masih seperti pada grafik sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana pada grafik berikut



Grafik 1.2 PDRB tanpa Migas atas Dasar Harga Berlaku menurut Kota



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut lapangan usaha 2013-2017, Katalog BPS . 9302008.35

Berdasarkan data Grafik 1.2, dapat dikemukakan, bahwa PDRB Kota Madiun tanpa migas memang masih rendah, namun ternyata memiliki tren kenaikan. Hal ini dapat dijadikan sebagai daya dukung terhadap tata kelola pemerintahan secara *smart*.

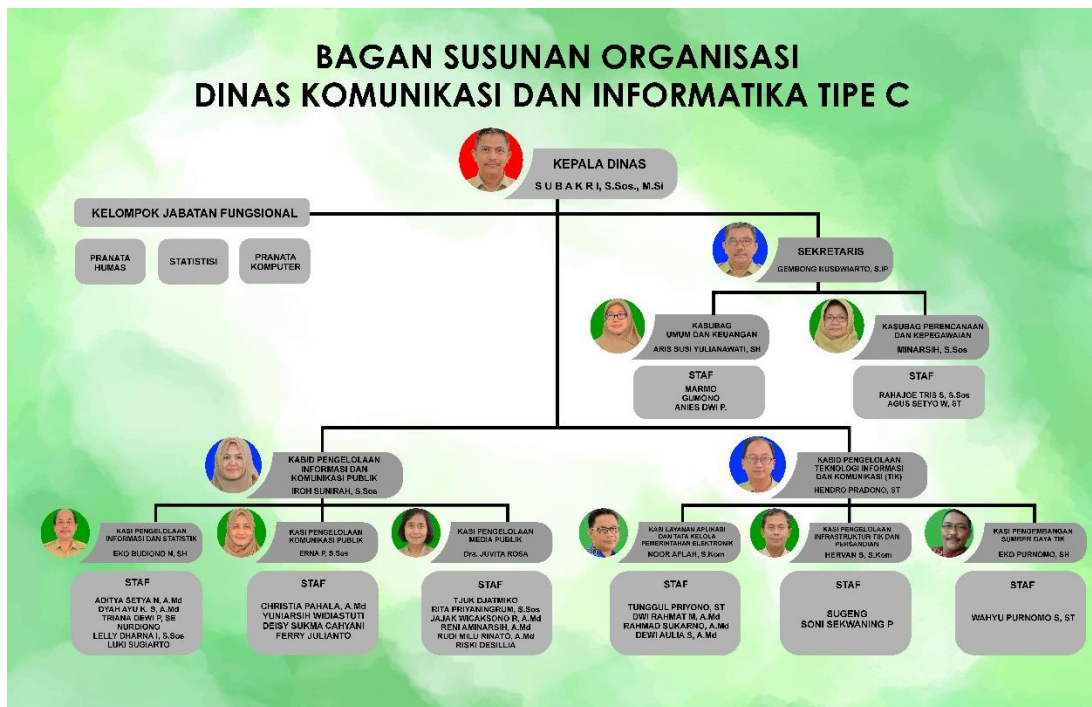
1.4 Analisis Kelembagaan, dan Relevansinya Terhadap Stakeholder

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 37 ayat (4), urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya terjabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola layanan Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan layanan *e-government*.

Berkaitan dengan hal tersebut Kota Madiun telah menyiapkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang cukup sesuai. Pada struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, untuk melaksanakan tugas fungsi informasi komunikasi publik, dibentuk Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.



Sedangkan untuk melaksanakan fungsi *e-government* dibentuk Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun



Bab 2

ANALISIS KESIAPAN DAERAH



**Smart City
Kota Medan**

Bab 2

ANALISIS KESIAPAN DAERAH

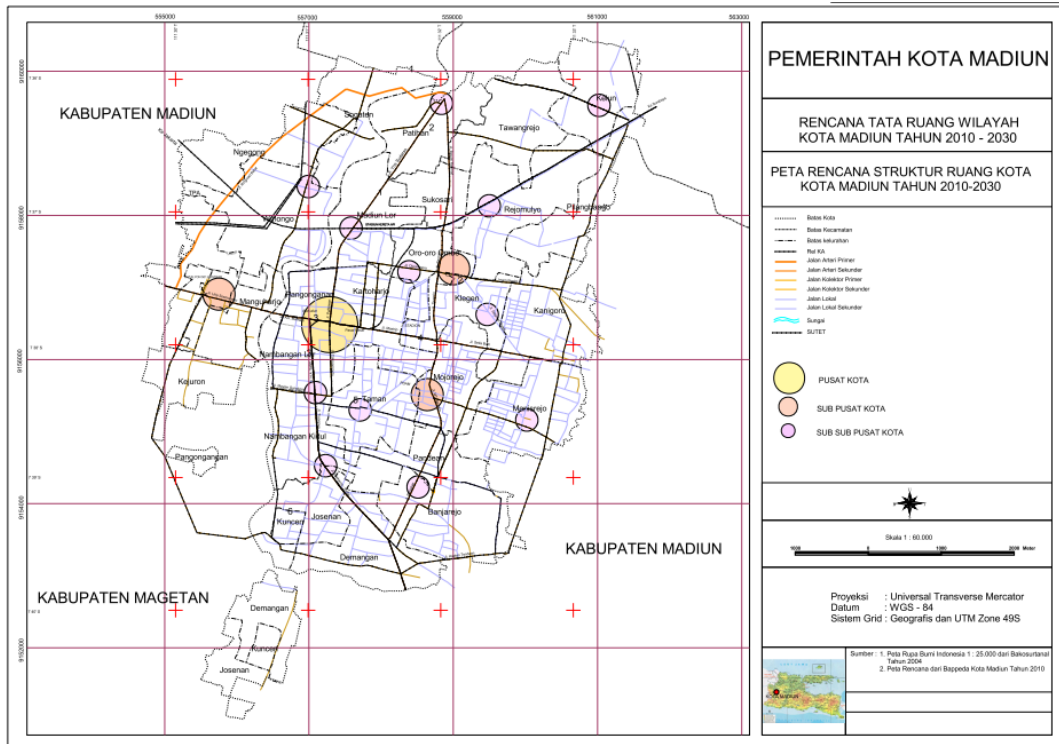


Analisis kesiapan *smart city* daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan *smart city*. Di dalam analisis kesiapan *smart city* daerah, terdapat lima aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu Nature, Struktur, Infrastruktur, Culture dan Suprastruktur.

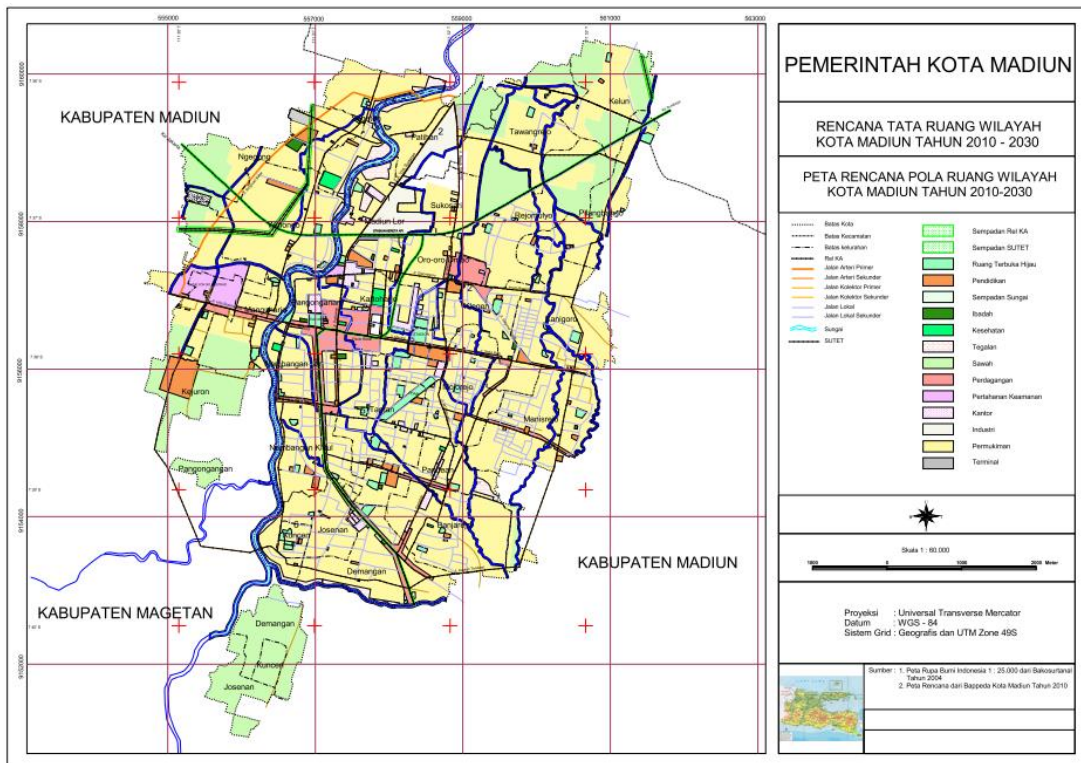
2.1 Analisis Nature (Faktor Anugrah Sumber Alam)

Faktor sumber daya alam, pada satu sisi akan menjadi potensi dalam pengembangan *smart city*, tetapi pada sisi yang lain dapat juga sebagai penghambat terhadap implementasi *smart city*. Pemerintah kota Madiun saat ini sudah memiliki rencana tata ruang wilayah kota tahun 2010 – 2030. Hal tersebut untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan daya dukung alam di wilayah Kota Madiun. Rencana tata ruang yang telah disusun merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang yang dibuat adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Oleh sebab itu, rencana tata ruang yang telah disusun adalah hasil dari perencanaan tata ruang seperti yang dimaksud pada **Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 6 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.





Gambar 2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030



Gambar 2.2 Pola Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030



Rencana pola ruang wilayah sebagaimana peta diatas diwujudkan dalam bentuk:

1. Rencana kawasan lindung.

a. Kawasan perlindungan setempat.

Pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui pembatasan kegiatan pada sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, pemanfaatan daerah sempadan sungai, sempadan rel kereta api untuk RTH, dan penataan kawasan tepian sungai untuk pariwisata.

b. RTH.

Pengembangan RTH kota dilakukan melalui pengembangan RTH pemakaman, RTH gerbang kota, RTH hutan kota, pengembangan RTH sebagai pendukung ruang evakuasi bencana, pengendalian perubahan fungsi pada RTH yang sudah ada dan pengembangan zona penyangga kawasan industri.

c. Kawasan cagar budaya.

Pengelolaan kawasan suaka alam dan cagar budaya dilakukan melalui perlindungan benda cagar budaya dan pengembangan cagar budaya sebagai pendukung pariwisata budaya.

d. Kawasan rawan bencana alam.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir.

2. Rencana kawasan budidaya.

a. Kawasan peruntukan perumahan.

Pengembangan kawasan perumahan dilakukan melalui pembangunan perumahan, perbaikan kualitas perumahan, dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

b. Kawasan peruntukan perdagangan jasa.

pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan wisata budaya, wisata belanja, dan wisata pendidikan pada kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan kawasan perdagangan baru di Kelurahan Oro-oro Ombo seluas kurang lebih 6 Ha, pengembangan akomodasi wisata,



pengembangan perdagangan jasa pada tiap pusat pelayanan, peningkatan pasar umum, dan pengembangan pasar grosir.

c. Kawasan peruntukan perkantoran.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan pusat pelayanan masyarakat pada kawasan perkantoran.

d. Kawasan peruntukan industri.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil.

e. Kawasan peruntukan pariwisata.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan pusat wisata Jawa Timur.

f. RTNH.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan RTNH pekarangan.

g. Ruang evakuasi bencana.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan RTH lingkungan perumahan pada kawasan ruang evakuasi bencana dan pengembangan RTH kota.

h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.

Pengembangan kawasan ini dilakukan melalui pengembangan sektor informal pada kegiatan potensial seperti pariwisata dan fasilitas olah raga (stadion) pada kawasan peruntukan sektor informal serta penataan sektor informal.

i. Kawasan peruntukan pertanian.

Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara mempertahankan sawah irigasi teknis, diversifikasi komoditi pertanian, dan intensifikasi pertanian untuk mempertahankan hasil produksi pada kawasan peruntukan pertanian.

j. Kawasan peruntukan pelayanan umum.



Pengembangan kawasan ini melalui pengembangan politeknik negeri dan pembangunan pendidikan akademi perkeretaapian skala nasional pada kawasan peruntukan pelayanan umum di Kecamatan Manguharjo.

k. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan cara mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada dan pengembangan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030, pengembangan hutan kota dengan total kawasan seluas 24 Ha yang meliputi 3 kecamatan, meliputi:

1. Hutan kota di Kecamatan Manguharjo seluas kurang lebih 10 Ha.
2. Hutan kota di Kecamatan Kartoharjo seluas kurang lebih 7 Ha.
3. Hutan kota di Kecamatan Taman seluas kurang lebih 7 Ha.

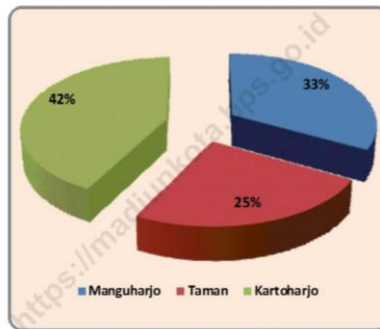
Penggunaan tanah lainnya berupa pertanian sawah dan permukiman. Kecamatan dengan lahan pertanian terluas seperti halnya tahun 2017 adalah tetap di Kecamatan Kartoharjo, meliputi 42% dari total keseluruhan lahan pertanian di Kota Madiun. Seluruhnya merupakan lahan pertanian irigasi.

Luas lahan pertanian di Kota Madiun terus berkurang setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan yang digunakan untuk bangunan perumahan dan pertokoan. Berdasarkan data catatan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, luas lahan produktif pada tahun 2016 mencapai 926 Ha, tahun 2017 turun menjadi 923 Ha, dan sampai akhir tahun 2018 menjadi 901 Ha.

Dalam usaha menekan alih fungsi lahan, Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Dalam perda tersebut terdapat lahan pertanian berkelanjutan yang dilarang untuk dialihfungsikan, yakni seluas 444 Ha hingga tahun 2030. Adapun, wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan, terdapat di daerah Kelurahan Kejuron, Pangongangan, Demangan, Kuncen, Josenan, Manguharjo, Kelun, Tawangrejo, dan Rejomulyo.



Namun data dari BPS Kota Madiun menyatakan bahwa luas panen padi sawah tahun 2018 jauh dibawah luas panen sawah pada tahun 2016. Penurunan tersebut terjadi hingga 69% sehingga pada akhir tahun 2017, luas panen sawah hanya mencapai 793 Ha.



Gambar 2.3 Persentase Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Madiun (hektar) tahun 2017
 Sumber Gambar : *madiunkota.bps.go.id*

Potensi lahan perkebunan yang ada di wilayah Kota Madiun, pemanfaatannya masih digunakan untuk budidaya tanaman kelapa dan tebu. Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa luas tanaman tebu di kota Madiun mengalami penurunan 22% pada tahun 2017. Data luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Madiun

Tahun	Luas Tanaman Perkebunan (Ha)		
	Kelapa	Tebu	Lainnya
2016	54	126	8
2017	54	98	8

Sumber : *Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*

Sedangkan untuk tingkat produksi tanaman perkebunan yang ada di Kota Madiun cenderung menunjukkan hasil yang sama pada tahun 2016 – 2017. Data tersebut didapatkan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana TABEL berikut.

Tabel 2.2 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Madiun

Tahun	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)		
	Kelapa	Tebu	Lainnya
2016	28	715	1
2017	28	715	1

Sumber : *Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur*



Pada potensi peternakan yang ada di Kota Madiun, terlihat bahwa masyarakat banyak yang memelihara kambing dan domba sebagai hewan ternaknya. Di tiga kecamatan yang ada, peternakan kambing dan domba menunjukkan tingkat populasi yang lebih tinggi dibandingkan ternak hewan lainnya, seperti sapi perah, sapi potong, dan kerbau.

Tabel 2.3 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak tahun 2017

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
Manguharjo	21	35	8	-	1225	426
Taman	-	71	-	-	671	119
Kartoharjo	-	191	-	4	1022	447
Total	21	297	8	4	2918	992

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Sedangkan untuk jenis unggas, peternakan ayam potong dan itik adalah yang paling banyak berada di tiga kecamatan. Khusus peternakan ayam petelur dan ayam pedaging berada di kecamatan Taman.

Tabel 2.4 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas tahun 2017

Kecamatan	Ayam kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Manguharjo	19190	-	-	3094
Taman	24403	2100	16000	1313
Kartoharjo	19824	-	-	1838
Total	63417	2100	16000	6245

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

2.2. Analisis Culture Daerah

Kota Madiun telah mengimplementasikan Budaya Organisasi pada *Open Government* dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat Madiun. Walikota beserta jajarannya telah melaksanakan keterbukaan Pemerintahan melalui kegiatan Musrenbang yang terlaksana pada awal tahun 2019. Walikota beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun telah merumuskan 208 program dan 81 kegiatan pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akses informasi lainnya adalah dengan memanfaatkan Aplikasi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Madiun, yaitu aplikasi **Madiun Karismatik**. Aplikasi tersebut tidak hanya mengemas berita, tetapi juga menyuguhkan berbagai aplikasi



sejumlah OPD Pemkot Madiun. Diantara aplikasi milik OPD yang dapat diakses adalah aplikasi e-kinerja, LPPD, e-surat, nota dinas, dan SPPT yang dikemas dalam menu aplikasi dinas. Sedangkan pada menu layanan masyarakat, terdapat aplikasi pemburu (Dukcapil), perizinan (DPMPTSPKUM), reses, dan LPSE. Aplikasi Madiun Karismatik juga menyuguhkan menu pengaduan dan permohonan wifi gratis bagi masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga menggunakan aplikasi LAPOR! – SP4N sebagai media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, saran dan pegaduan. Adanya pemanfaatan IT yang sejalan dengan perubahan kultur masyarakat akan dapat dilakukan secara bertahap serta tepat.

2.3. Analisis Struktur

Analisa struktur merupakan *driven/* pendorong dalam mewujudkan *smart city*. Dalam analisa struktur daerah, dikaji dalam beberapa aspek, yaitu sumber daya manusia, sumber daya pemerintah daerah, dan kapasitas keuangan daerah.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (*people*)
2. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (*managerial*)
3. Kapasitas Keuangan Daerah (*capital*)

2.3.1. Kualitas Sumber Daya Manusia (people)

Analisis kualitas sumber daya manusia dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat dalam menerima konsep *Smart City*. Kualitas masyarakat, berdasarkan berbagai kajian, dapat dilihat dari :

1. Kondisi demografi kependudukan, yakni komposisi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kelompok umur penduduk produktif.

Bonus Demografi Kota Madiun dengan Penduduk usia produktif dapat lebih besar pada pada periode 10 tahun kedepan. Komponen ini menjadi penggerak dalam pembangunan daerah, yaitu Kependudukan atau sumber daya manusia, hal ini baik kuantitas dan kualitas manusianya. Jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan Juni 2019 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.946 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.386 jiwa sehingga total penduduk Kota Madiun sebanyak 210.331 jiwa.

Jika jumlah penduduk diatas dijabarkan menurut jumlah penduduk per kecamatan, maka dapat didetailkan menjadi data berikut:

Kecamatan

laki-laki

perempuan

Total

Buku 1 Analisis Strategis Smart City Kota Madiun 2019-2024 | 23



Manguharjo	30.78432.16962.953		
Manguharjo	3.948	3.997	7.945
Sogaten	2.117	2.103	4.220
Patihan	2.687	2.777	5.464
Ngegong	1.556	1.576	3.132
Winongo	3.763	4.019	7.782
Madiun Lor	3.235	3.613	6.848
Pangongangan	1.770	1.942	3.712
Nambangan Lor	6.659	6.846	13.505
Nambangan Kidul	5.049	5.296	10.345
Taman	43.67845.59288.270		
Mojorejo	5.674	6.024	11.698
Pandean	5.241	5.485	10.726
Banjarejo	4.583	4.504	9.087
Kuncen	700	736	1.436
Manisrejo	7.926	8.318	16.244
Kejuron	4.762	5.166	9.928
Josenan	3.655	3.765	7.420
Demangan	4.666	4.830	9.496
Taman	6.471	6.764	13.235
Kartoharjo	28.48329.62558.108		
Oro-oro Ombo	3.385	3.578	6.963
Sukosari	1.512	1.636	3.148
Klegen	4.424	4.499	8.923
Rejomulyo	5.296	5.544	10.840
Pilangbango	2.298	2.327	4.625
Tawangrejo	2.122	2.175	4.297
Kanigoro	4.608	4.756	9.364
Kartoharjo	2.551	2.677	5.228
Kelun	2.287	2.433	4.720
Jumlah keseluruhan	102.946	107.386	210.331

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persebaran jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Taman yaitu 88.270



jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kartoharjo dengan jumlah penduduk hanya mencapai 58.108 jiwa.

Struktur umur penduduk Kota Madiun didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 124.061 jiwa pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 70,45% penduduk Kota Madiun berada dalam usia produktif. Lebih jelas jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Madiun hingga Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Rentang Usia tahun 2018

No	Rentang Usia (5 tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0-4	12.271	6,97
2.	5-9	12.583	7,15
3.	10-14	12.018	6,82
4.	15-19	13.874	7,88
5.	20-24	12.519	7,11
6.	25-29	12.245	6,95
7.	30-34	13.025	7,40
8.	35-39	12.506	7,10
9.	40-44	12.998	7,38
10.	45-49	13.460	7,64
11.	50-54	13.138	7,46
12.	55-59	11.872	6,74
13.	60-64	8.435	4,79
14.	65+	15.155	8,61
Jumlah		176.099	100

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

2. Pendidikan.

Tingkat dan lulusan pendidikan masyarakat Kota Madiun pada tahun 2017 masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, tingkat lulusan universitas juga menyusul di urutan selanjutnya.

Berdasarkan data tersebut, Kota Madiun memiliki peluang untuk mendayagunakan potensi lulusan SDM yang ada untuk mendukung program pembangunan yang akan berjalan. Dengan proyeksi meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, maka akan menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan angka kelulusan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.



Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	622	0,66
2.	Tidak/Belum Tamat SD	4.031	4,27
3.	Sekolah Dasar (SD)	8.792	9,31
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	14.339	15,18
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20.017	21,20
6.	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)	23.966	25,38
7.	Diploma I/II/III/Akademi	3.677	3,89
8.	Universitas	18.991	20,11
Jumlah		94.435	100

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

Disamping itu juga terdapat beberapa lembaga kursus ketrampilan, dengan beragam kompetensi yang dapat menjadi bagian dalam penguatan SDM masyarakat Kota Madiun, termasuk yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Selain itu, kelompok komunitas di Madiun, seperti Relawan TIK, Blogger, komunitas seni tari, budaya, komunitas kuliner, fotografi, dan lain-lain.

3. Tingkat mata pencaharian masyarakat.

Mata pencaharian penduduk Kota Madiun, sebagian besar adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai dan wiraswasta. Oleh karena itu dalam perumusan program-program pembangunan dapat diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan peningkatan keterampilan untuk pelaku UMKM.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Berusaha sendiri	14.974	16,56
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	8.289	9,17
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.799	7,52
4.	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	47.518	52,56



No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
5.	Pekerja bebas	4.709	5,21
6.	Pekerja keluarga/ tak dibayar	8.126	8,98
Jumlah		90.415	100

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

2.3.2. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (*managerial*)

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program *Smart City* dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari *Smart City*, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan *Smart City* merupakan factor kunci keberhasilan *Smart City*.

Pada tahun 2018 kondisi kepegawaian di Kota Madiun mengalami perkembangan yang cukup baik. Dari sisi kualitas dan taraf pendidikan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jumlah pegawai per OPD dan latar belakang pendidikan di Kota Madiun sampai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.8 Data Jumlah Pegawai Setiap OPD berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Nama OPD	Jumlah Pegawai Berlatar belakang TIK (D3/S1/S2/S3)	Jumlah Pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1	0
2	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	3	0
3	Badan pendapatan Daerah	0	0
4	Sekretariat Daerah Kota Madiun	2	0
5	Sekretariat DPRD	0	0
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	1
8	Dinas penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro	0	0
9	Dinas kesehatan dan KB	2	0
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	0	0
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	0	0
13	Dinas Pendidikan	16	0
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	0
15	Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	3	0
16	RSUD Sogaten Kota Madiun	5	0
17	Dinas Perpustakaan	0	0



	dan Kearsipan		
18	Satpol PP	1	0
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5	0
20	Inspektorat Kota Madiun	1	0
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	0
23	Dinas Perdagangan	0	0
24	Dinas Perhubungan	0	0
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	0
26	Dinas Tenaga Kerja	1	0

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa masih ada OPD-OPD yang belum memiliki pegawai dengan pendidikan minimal D3/S1. Demi menunjang kualitas pekerjaan dan manajemen yang lebih baik, Pemkot Madiun masih perlu untuk melakukan penambahan jumlah SDM pegawainya yang memiliki latar belakang pendidikan minimal D3/S1.

2.3.3. Kapasitas Keuangan Daerah (*capital*)

Analisis terhadap kapasitas keuangan Kota Madiun bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program *Smart City*.

Tabel 2.9 Sumber Dana dan Besar Anggaran untuk Penerapan Smart City



No.	Sumber Anggaran (APBD/Non APBD)	Lembaga Pemberi Dana (untuk Non APBD)	Peruntukan Penggunaan Anggaran	Jenis Bantuan (Hibah, Loan, dsb)	Nominal	Keterangan
1.	APBD	-	Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web	-	4.935.178.000	
2.	APBD	-	Kegiatan Integrasi Sistem Informasi	-	576.799.000	
3.	APBD	-	Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	-	1.053.327.000	

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

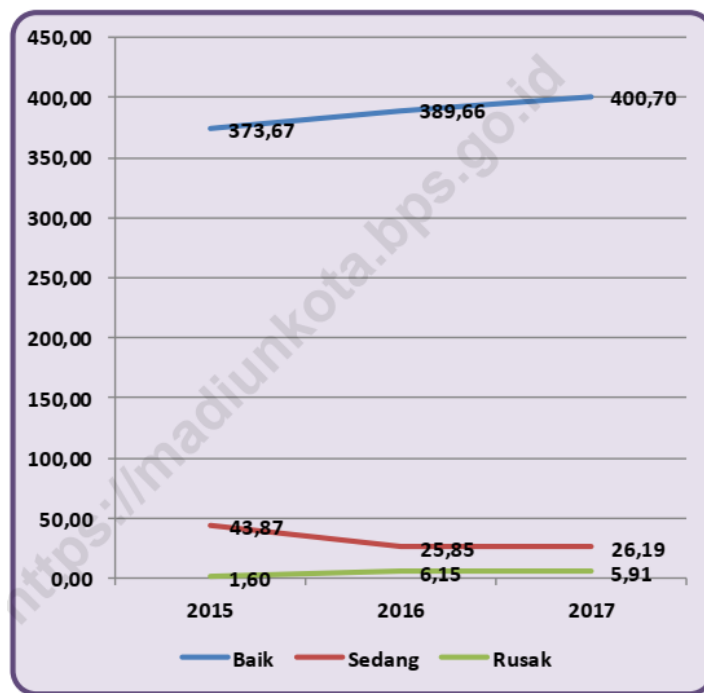
Berdasarkan data di atas, Kota Madiun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung implementasi *Smart City* yang berasal dari APBD. Dengan adanya kondisi anggaran tersebut, maka Kota Madiun dapat dikatakan siap secara finansial dalam mewujudkan pembangunan berbasis *Smart City*.

2.4. Analisis Infrastruktur

2.4.1. Fisik

Sejak akhir Tahun 2016, sudah tidak ada lagi jalan yang dikelola pemerintah Kota Madiun yang kondisinya rusak berat. Jalan dengan kondisi baik semakin bertambah panjangnya, yang mengindikasikan bahwa pembangunan dalam bidang infrastruktur semakin memperlihatkan hasil yang nyata. Pada akhir tahun 2017, jalan yang dikelola oleh Pemkot Madiun sepanjang 421,66 Km.





Gambar 2.4 Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Jalan (km) di Kota Madiun tahun 2015-2017

Sumber : *madiunkota.bps.go.id*

Menurut data dari Dinas Perhubungan di Kota Madiun, sarana transportasi di Kota Madiun sudah cukup memadai. Terdapat terminal bus di Kota Madiun, bernama TERMINAL PURBAYA. Selain terminal berkategori A itu, di Kota Madiun masih dilengkapi dengan dua sub terminal, masing-masing adalah SUB TERMINAL MANIS REJO dan SUB TERMINAL MAYJEN SINGKONO.

Selain itu jumlah kantor pos pemeriksa dan kantor pos cabang masih sama seperti tahun lalu. Hanya loket ekstensi saja yang mengalami kenaikan jumlah, dari 3 unit menjadi 4 unit, di akhir tahun 2017. Jumlah pelanggan layanan TELKOM juga meningkat pesat dari tahun lalu. Pada akhir tahun 2017, jumlah pelanggan TELKOM tercatat sebanyak 40.411, naik sekitar 78,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Angka tersebut terbilang yang cukup tinggi. Segmen pelanggan yang banyak mengalami kenaikan adalah segmen Pelanggan Biasa, dan kecamatan dengan pelanggan terbanyak adalah Kecamatan Taman dengan 18.737 pelanggan, dengan 16.255 diantaranya berasal dari segmen Pelanggan Biasa.

Pada sektor pendidikan, Kota Madiun juga sudah memiliki fasilitas bangunan sekolah yang cukup memadai. Pada tahun 2017, Dinas Pendidikan Kota Madiun mencatat bahwa terdapat total 69 bangunan sekolah dasar, 16 bangunan MI, 23 bangunan SMP, 4 bangunan MTs, 12 bangunan SMA, 30 bangunan SMK, dan 5 bangunan MA. Dengan jumlah bangunan sekolah tersebut, harapannya Kota Madiun



dapat memenuhi daya tampung sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ingin bersekolah.

Tabel 2.10 Jumlah Bangunan Sekolah di Kota Madiun tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Bangunan Sekolah Tahun 2017						
	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
Manguharjo	21	7	11	1	3	11	-
Taman	25	6	9	2	4	11	4
Kartoharjo	23	3	3	1	5	8	1
Total	69	16	23	4	12	30	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

Pada sektor kesehatan, Kota Madiun dilengkapi dengan fasilitas Poskedes hingga rumah sakit. Fasilitas kesehatan telah tersebar di tiga kecamatan. Dengan kondisi tersebut, harapannya masyarakat Kota Madiun dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dari lokasi tempat tinggalnya. Kecamatan dengan jumlah fasilitas rumah sakit terbanyak ada di Kecamatan Manguharjo. Sedangkan kecamatan dengan fasilitas posyandu terbanyak ada di Kecamatan Taman.

Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Madiun tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017				
	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Posbindu	Poskesdes
Manguharjo	4	2	80	41	9
Taman	1	2	123	52	9
Kartoharjo	3	2	67	28	9
Total	8	6	270	121	27

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

2.4.2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada bagian pertama, akan diidentifikasi adalah infrastruktur teknologi informasi yang telah ada pada tahun 2018. Infrastruktur TI yang telah didata meliputi infrastruktur fasilitas jaringan 4G/3G, jaringan komputer antar OPD, dan perangkat keras (*hardware*) penunjang operasional OPD yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Kondisi Infrastruktur TI untuk Mendukung Smart City

No	Ketersediaan infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
----	--------------------------------	--------------	---



No	Ketersediaan infrastruktur TIK	Ya/ Tidak	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1	Ketersediaan jaringan 4G/3G	Ya	Jumlah : existing 57 3G / 2G 21 4G Sebaran : 78 zona yang ada Kapasitas : 100-125 Mbps Status : Aktif
2	Ketersediaan Broadband Access	Ya	Jumlah : 25 Sebaran : jaringan Nirkabel : menurut perwal 41 tentang Cell Plan terdapat 20 zona untuk penyediaan menara baru FO : Telkomsel, Telkom, Indosat, PT. PLN, Biznet. Kapasitas : 100-125 Mbps Status : aktif
3	Akses internet terpusat (didistribusikan)	Ya	Jumlah : 1 Sebaran : seluruh OPD, SMP, SD, Puskesmas dan Pustu Kapasitas : 150 Mbps Status : aktif
4	Jaringan antar OPD (Instansi pemerintah)	Ya	Jumlah : 154 Sebaran : 61 OPD, 15 SMP, 54 SD, 6 Puskesmas dan 18 Pustu menggunakan jaringan wireless dan Fiber Optic Kapasitas : - Status : aktif
5	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	Ya	Untuk Internal Pemerintah: Jumlah : 154 Sebaran : 61 OPD, 15 SMP, 54 SD, 6 Puskesmas dan 18 Pustu menggunakan jaringan wireless dan Fiber Optic Kapasitas : - Status : Aktif Untuk Publik : Jumlah : 1400 Sebaran : 1400 titik poskamling se-Kota Madiun Kapasitas : - Status : Aktif
6	Data Center Pemerintah	Tidak	-
7	Data Center Recovery Pemerintah	Tidak	-

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

Infrastruktur digital daerah, seperti ditampilkan pada tabel di atas dijelaskan bahwa Kota Madiun belum memiliki *Command Center* dan *data Center*. Namun Kota Madiun telah didukung ketersediaan *Broadband Access* disediakan di 25 titik. Sedangkan akses Internet perkantoran dikelola terpusat oleh Dinas Kominfo dengan



kapasitas 150 Mbps. Selain itu, Pemkot Madiun juga telah menyediakan fasilitas wifi publik di 1400 titik.

Pemkot Madiun juga telah menyiapkan aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Jenis-jenis aplikasi yang telah tersedia diantaranya adalah aplikasi pelayanan publik, aplikasi administrasi dan manajemen umum, aplikasi administrasi legislasi, aplikasi manajemen pembangunan, aplikasi manajemen keuangan, dan aplikasi manajemen kepegawaian.

Tabel 2.13 Daftar Aplikasi Kota Madiun tahun 2018

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
A	Pelayanan Publik:		
	1. Sektor Pendidikan	1) Dapodik 2) PMP 3) LI 4) BOS 5) SIM Data Pendidikan 6) SIM Pendataan dan Pemetaan Guru 7) SIMPKB	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
	2. Sektor Kesehatan	1) SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS & IMS) 2) SIGIZI (Sistem Informasi Gizi) 3) SIHEPI (Sistem Informasi Hepatitis dan ISP) 4) SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu) 5) Sistem Program Pelaporan ISPA 6) Sistem FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) 7) ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) 8) SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika & Psikotropika Nasional) 9) SISTEM PWS (Aplikasi Imunisasi Pemantauan Wilayah Setempat) 10) SSKOHATKES SHAR'I (Sistem Informasi Kesehatan Haji Indonesia) 11) Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Berbasis Puskesmas 12) RS Online 13) SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap)	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif



	14) E-Renstra 15) E-Monev RS 16) SIM Rumah Sakit 17) SIM BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	Aktif Aktif Aktif Aktif
3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) QGIS (GIS Quantum Pemetaan) 2) SIM BG (Ijin Pendirian Bangunan)	Aktif Aktif
4. Sektor Sosial	1) SLRS 2) SIMPONI	Aktif Aktif
5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1) SIM Evaluasi Satpol PP	Aktif
6. Sektor Tenaga Kerja	1) SUDODIGA 2) Web Dinas Tenaga Kerja 3) Web Regis Lembaga 4) SIWALAN 5) Aplikasi Registrasi Motor	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
7. Sektor Pertanahan	-	-
8. Sektor Lingkungan Hidup	1) Timbangan Sampah 2) SIL 3) GIS	Aktif Aktif Aktif
9. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) SIAK v6 2) SIAK Konsolidasi Pusat 3) SIM Cek Duplicate NIK 4) Benrool (Perekaman) 5) Bcard (Pencetakan KTP-el)	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
10. Sektor Perhubungan	1) TMC 2) LHKPN	Aktif Aktif
11. Sektor Komunikasi dan Informatika	1) SIMAYA 2) SIRUP (SI Rencana Umum dan Pengadaan) 3) SP4N LAPOR 4) Website PPID 5) Website Seluruh OPD	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
12. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-
13 Sektor Lingkungan Hidup	-	-
14. Sektor Kebudayaan	-	-
15. Sektor Perpustakaan	1) Inslite 2) SIM Perpustakaan	Aktif Aktif
16. Sektor Kearsipan	1) JIKN / SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional)	Aktif
17. Sektor Persandian	-	-



	18 Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	1) Database Koperasi Se-Jatim	Aktif
	19. Sektor Penanaman Modal	1) Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah 2) E-JIS (East Java Investment Super Coridor) 3) SPIPC (Sistem Layanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) 4) Sistem Informasi Pengajuan Izin Internal Dinas	Aktif Aktif Aktif Aktif
	20. Sektor Statistik	-	-
	21. Sektor Pertanian	1) SKPG 2) Neraca Bahan Makanan 3) Panel Harga	Aktif Aktif Aktif
	22. Sektor Perdagangan	1) Software Database Pedagang Pasar 2) Aplikasi Papan Harga Sembako 3) Siskaperbako (Harga Konsumen Per Daerah) 4) Sistem Informasi Integrasi Penagihan Retribusi	Aktif Aktif Aktif Aktif
B	Administrasi dan Manajemen Umum	1) <u>SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)</u> 2) <u>SIMJAB (Analisis Jabatan)</u> 3) <u>Sistem Administrasi Internal</u> 4) <u>SEMEPS</u>	Aktif Aktif Aktif Aktif
C	Administrasi Legislasi	1) <u>JDIH</u>	Aktif
D	Manajemen Pembangunan	1) <u>SIPP</u> 2) <u>SIPD (Pembangunan Daerah)</u> 3) <u>RANHAM</u> 4) <u>Pembangunan SIM Database Bappeda Madiun</u> 5) <u>Website Profil Investasi Madiun</u> 6) <u>Portal TPKK</u> 7) <u>SIM Database Penanggulangan Miskin</u> 8) <u>Data Warehouse Info Ekososbud</u> 9) <u>SIMRENBANG (Perencanaan KUA-PPAS)</u>	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
E	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-Monitoring)	1) SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) 2) E-Budgeting 3) E-Monev 4) E-Harga 5) LKPP (Lelang Procurement) 6) E-Katalog 7) SIKD/ SIKUDA/ SIPKD	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif



		8) E-Kinerja 9) SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) 10) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) 11) SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) 12) SISMIOP (Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak) 13) SIG PBB (Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan)	Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
F	Manajemen Kepegawaian	1) <u>SIK (Sistem Informasi Kepegawaian)</u> 2) <u>E-Formasi</u> 3) <u>SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)</u>	Aktif Aktif Aktif

Sumber : Hasil Kuisisioner Gerakan Menuju Smart City tahun 2018 Kota Madiun

Berdasarkan tabel pemanfaatan sistem informasi diatas, dijelaskan bahwa pemerintah Kota Madiun telah memanfaatkan aplikasi online guna menunjang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai urusan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih baik, Pemkot Madiun telah menggunakan aplikasi SIPP, SIPD, RANHAM, SIM Database BAPPEDA kota Madiun, Portal TPKK, SIM Database Penanggulangan Miskin, Data Warehouse Info Ekososbud, dan SIMRENBANG. Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat menunjang implementasi *Smart City* dalam pembangunan Kota Madiun.

2.4.3. Sosial

Kondisi Sosial Budaya Kota Madiun dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan sebuah bangsa, karena pendidikan menyangkut masa depan sebuah negara. Maka dari itu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Tingkat kemajuan pendidikan dapat dilihat dari data fasilitas pendidikan atau jumlah sekolah yang ada di sebuah wilayah tersebut. Untuk Kota Madiun jumlah sekolah yang ada bisa dikatakan lebih dari cukup bila dihitung dengan perbandingan luas wilayah terhadap jumlah penduduk.

Selain pendidikan dan kesehatan, faktor kesejahteraan masyarakat sangatlah berpengaruh bagi kondisi sosial budaya suatu daerah. Terutama tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu faktor utama suksesnya kinerja pemerintah sebagai



pelayan masyarakat. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2016). Jumlahnya mencapai 8,70 (000 jiwa) atau sekitar 4,94 persen dari total penduduk proyeksi pertengahan tahun. Hal ini mengindikasikan tren positif, dimana keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan mulai menunjukkan hasil nyata.

Tabel 2.14 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Madiun tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2013	320.210	8,70	5,02
2014	338.609	8,50	4,86
2015	359.771	8,55	4,89
2016	376.956	9,05	5,16
2017	404.959	8,70	4,94

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

2.5. Analisis Suprastruktur

Secara kebijakan dan kelembagaan, Kota Madiun telah memulai penyusunan rencana induk (Master Plan) *Smart City*. Dimana OPD yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan *Smart City* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Mekanisme penyusunan perencanaan tersebut dilakukan melalui kegiatan swakelola. Draft kebijakan, draft Peraturan Walikota, Draft Perwakilan Bupati, Draft Surat Edaran dalam hal penerapan *Smart City* ditandai dengan adanya peraturan walikota.

Tabel 2.15 Peraturan Terkait Pembangunan Smart City Kota Madiun

No	Nomor referensi kebijakan	Tentang/ruang lingkup	Sudah diterapkan/ Belum	Jenis kebijakan
1.	PERATURAN WALIKOTA 2014 No. 48	Masterplan teknologi informasi dan komunikasi kota madiun tahun 2014-2019	Sudah	Masterplan teknologi informasi dan komunikasi kota madiun





Bab 3

ANALISIS GAP



Smart City Kota Medan

Bab 3

ANALISIS GAP



Mengacu pada analisis masa depan dan analisis kesiapan daerah, untuk menemukan kesenjangan, dilakukan identifikasi analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). Analisis lingkungan internal memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan sedangkan analisis lingkungan eksternal memberikan gambaran peluang dan ancaman.

Analisis Gap Smart Governance						
TOWS MATRIX - SMART GOVERNANCE KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Public Service	Birokrasi	Kebijakan	Public Service	Birokrasi	Kebijakan
	SP.1 Area pelayanan (demografi Kota Madiun) tidak terlalu luas SP.2 Transportasi mudah terjangkau SP.3 Jumlah penduduk sedikit SP.4 Insfrastruktur bagus SP.5 Pelayanan cepat SP.6 Pelayanan tuntas (pendaftaran sampai resep obat keluar dalam	SB.1 Kemudahan pengurusan SB.2 Sudah banyak inovasi untuk pemangkasan birokrasi SB.3 Anggaran mencukupi	SK.1 Transparansi standar pelayanan kepada masyarakat SK.2 Komitmen pimpinan SK.3 Ketersediaan regulasi	WP.1 Masih belum ada pelayanan yang terintegrasi, masih terpisah-pisah (1) WP.2 Beberapa layanan masih lama (1) WP.3 Transparansi pelayanan ada yang masih kurang jelas (1) WP.4 Masih ada layanan yang berbayar (1 dan 2) WP.5 Manajemen antrian belum semuanya terukur (1) WP.6 Masih ada layanan yang belum	WB.1 Masih ada pelayanan yang belum sesuai standar WB.2 Masih ada pelayanan yang manual WB.3 Jumlah SDM terbatas (5 dan 6) WB.4 Masih ada ego sektoral (5) WB.5 Masih ada budaya birokrasi yang belum mengarah ke pelayanan prima	WK.1 Sering terjadi benturan kebijakan daerah dan pusat



			sehari) SP.7 Di beberapa pelayanan SDM cukup mumpuni			sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan (1)		
Opportunity	Public Service	OP.1 Dimungkinkan untuk terbitnya Satu Kartu untuk semua pelayanan	Menciptakan Layanan Publik yang Efektif dan Efisien [SP.5, SP.6, SP.7 - OP1]					
	Birokrasi	OB.1 Birokrasi sudah mulai mawadahi kemajuan teknologi		Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik [SB.1, SB.2; SK.1 - OB.1]	Meningkatkan Ketersediaan Informasi Penyediaan Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok [WP.1 - OB.1]	Menguatkan Tata Kelola Birokrasi [WB.1, WB.2, WB.3, WB.5 - OB.1]	Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik [WK.1 - OB.1]	
	Kebijakan	OK.1 Komitmen pimpinan saat ini sudah cukup tinggi OK.2 Koordinasi antar OPD sudah mulai berjalan						
Threats	Public Service	TP.1 Adanya calo pelayanan (1) TP.2 Oknum petugas pelayanan yang masih profit oriented (3) TP.3 Masih ada perbedaan perlakuan bagi kalangan/kelompok social tertentu (3)						
	Birokrasi	TB.1 Kurang tegasnya penegakan sanksi bagi SDM pelayanan yang melakukan pelanggaran (8)		Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia [SB.3; SK.2, SK.3 - TB.1]				
	Kebijakan	TK.1 Masih adanya budaya sungkan dalam penegasan aturan						



		pelayanan					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

Analisis Gap Smart Economy

TOWS MATRIX - SMART ECONOMY KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan
	KI.1 Banyaknya IKM (1000an) --> industri sekunder KI.2 Banyak petani (peternakan, perikanan) --> industri primer KI.3 Adanya perda yang mengatur pasar modern KI.4 Ikon makanan khas Sambel Pecel	KK.1 Banyak pelatihan peningkatan ketrampilan usaha KK.2 Insentif pajak untuk wajib pajak baru (3 bulan bebas pajak) KK.3 Prioritas pencari kerja diutamakan KTP Kota Madiun	KT.1 Fasilitas rekomendasi pendanaan ke bank daerah	KM.1 Kemampuan pelaku industri sekunder terbatas KM.2 Ketersediaan lahan industri primer terbatas KM.3 Area pemasaran industri terbatas KM.4 Belum optimalnya tingkat daya saing produk (belum terstandarisasi) KM.5 Pelaku usaha belum terpusat (karena berawal dari industri rumah tangga) KM.6 Belum adanya sentralisasi pelaku industri informal (misal: pusat PKL) KM.7 Kesulitan membuat sentra karena pelaku	KS.1 Pola pikir bersaing pelaku usaha kurang (termasuk kesadaran pajak, legalitas, varian produk, kualitas/standarisasi, packaging)	KR.1 Belum siapnya daerah untuk menyediakan sistem yang mempermudah pembayaran pajak (misal: tersedia kode bayar untuk pembayaran pajak) KR.2 Ketergantungan pada petugas pungut pajak maupun retribusi masih tinggi KR.3 Budaya cashless masih rendah



						<p>usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi</p> <p>KM.8 Belum tegasnya penegakan Perda bagi pelaku industri</p> <p>KM.9 Bahan baku berkualitas tidak tersedia (bergantung daerah lain)</p> <p>KM.10 Karakter produk belum kuat (Misal: Sambel Pecel)</p>		
Opportunity	Industri	<p>PI.1 Pusat wilayah pengembangan Jawa Timur Bagian Barat</p> <p>PI.2 Sebagai kota transit perdagangan daerah sekitar</p>				Mengembangkan Hub Industri Unggulan [KM.3 - PI.1]		
	Kesejahteraan Masyarakat	<p>PK.1. Banyaknya wisatawan pendatang</p>	Mengintegrasikan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dengan membuat destinasi baru PeceLand [KI.4 - PK.1]			Menguatkan Karakter Sambel Pecel Khas Madiun [KM.10 - PK.1]		
	Transaksi Keuangan	<p>PT.1 Berkembangnya Fintech</p>			Mengembangkan Sistem Punishment-Reward			Meningkatkan Kerjasama dengan penyedia transaksi



					(pengurangan pajak, kemudahan izin, dsb.) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi cashless [KK.2, PT.1]			elektronik [KR.3 - PT.1]
Threats	Industri	AI.1 Kualitas packaging produk kompetitor luar daerah bervariasi dan menarik AI.2 Banyak jenis produk yang sama AI.3 Tenaga kerja industri terampil dari luar wilayah	Meningkatkan Daya Saing Produk [KI.1 - AI.1]	Memberdayakan SDM Usia Produktif di sektor ekonomi kreatif [KK.1, KK.3 - AI.3]	Meningkatkan Kemampuan Mengelola Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha [KT.1 - AI.1]			
	Kesejahteraan Masyarakat	AK.1.SDM berpindah keluar dari Madiun karena kurang tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat dan keahlian						
	Transaksi Keuangan	AT.1. Belumbanyak dan meratanya usaha di Madiun yang menggunakan pembayaran cashless AT2. Belum banyak dan						



		meratanya usaha yang mencatata keuangan secara digital						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis Gap Smart Branding

TOWS MATRIX - SMART BRANDING KOTA MADIUN 2019	Strength						Weakness					
	TOURISM (Membran gun Ekosistem Pariwisata) & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahan a rekreasi keluarga	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumonso begai daya tarik wisata kuliner	Rebranding Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	TOURISM (Membran gun Ekosistem Pariwisata) & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	Cagar Budaya sebagai wahan a rekreasi dan edukasi keluarga	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumonso begai daya tarik wisata kuliner	Rebranding Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion
ST.1 terdapat TOL Trans Jawa	SR.1 terdapat TOL Trans Jawa	SC.1 21 (duapuluh satu) cagar budaya	SK.1 32 Hotel di Madiun	SH.1 TOL trans Jawa	SB.1 TOL trans Jawa	WT.1 belum ada Padepokan bersama	WR.1 Minimnya rasa memiliki	WC.1 Rusak karena usia	WK.1 belum ada pusat jajanan oleh-oleh	WH.1 Menjamurnya rumah kos	WB.1 belum ada sentra	
ST.2 Stasiun Besar	SR.2 Stasiun Besar	SC.2 Bus Pariwisata	SK.2 Menjamurnya bisnis online	SH.2 Stasiun besar	SB.3 kampung batik	WT.2 Belum menampakkan wajah Kota	WR.2 Kurangnya kesadaran menjaga fasilitas umum		WK.2 pengemasan belum marketable	WH.2 Menurunnya angka hunian di akhir pekan	WB.2 industri batik	
ST.3 Padepokan Pencak	SR.3 RTH tematik	SC.3 Komunitas pemerhati budaya	SK.3 e-Commersegallery yang di kelola	SH.3 32 Hotel di Madiun	SB.4 10 motif Batik Khas madiun	WT.3 sebagai kampung Pesilat			WK.3 belum dipatenkannya		WB.2 kualitas masih	
ST.4 Tugu Perguruan Pencak	SR.4 RTH terfasli		DPMPTSK	SH.4 Transpor tasi Masal dan Ojol	SB.5 Baju							



			(sebelas) Perguruan Silat ST.6 CFD sebagai sarana berekspre si	tasi Wifii		UM		Khas Madiun	Minimnya prestasi atlit pencak			sambel pecel Madiun		belu m terja ga WB.3 Kura ng berda ya saing
Opportu nity	TOURISM (Memban gun Ekosiste m Pariwisata a) & APEARAN CE (penataa n wajah Kota)	OT.1 Event tahunan Suran Agung SH Winongo OT.2 Event tahunan Suroan SH Terate OT.3 Pertandin gan Pencak Silat OT.4 Festival Seni Pencak Silat Nusantara	Meningka tkan Citra Kota Pendekar [ST.3, ST.4 - OT.3, OT.4]											
	Ruang terbuka Hijau (RTH)	OR.1 Layanan Bus									Memperc antik Wajah Kota			



	sebagai wahana rekreasi keluarga	Pariwisata a OR.2 Jum'at bersepeda a bersama walikota dan warga ke RTH								[WR.1, WR.2 - OR.1]				
	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	OC.1 Layanan Bus Pariwisata a OC.2 Dibukanya akses ke seluruh cagar budaya OC.3 Pendanaan Rehabilitasi Cagar budaya			Mempertahankan Kearifan Budaya Lokal [SC.1, SC.2, SC.3 - OC.2, OC.3]									
	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumungso	OK.1 Festival Pecel Pincuk OK.2 Penyajian menu di	Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Khas Madiun [ST.1,											



	bagai daya tarik wisata kuliner	hotel dan restoran	ST.2 - OK.1]										
	Rebranding Hotel di Kota Madiun	OH.1 Festival budaya di Kota Madiun										Meningkatkan Kemudahan Akses Potensi Wisata [WK.1, WK.2, WK.3; WH.1; WB.1, WB.2, WB.3 - OH.1]	
	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	OB.1 Festival budaya di Kota Madiun OB.2 Batik sudah go-Internasional					Mengembangkan Industri Kreatif [SB.3, SB.4, SB.5 - OB.2]						
Threat	TOURISM (Membangun Ekosistem Pariwisata) & APEARANCE (penataan wajah Kota)	TT.1 Konflik Internal dan Eksternal TT.2 Fanatisme TT.3 Suran Agung dan Suroan masih menjadi agenda			Meningkatkan Ekosistem Budaya Pariwisata [SC.3 - TT.1, TT.2]								



		yang meresahkan												
	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	TR.1 Rusak karena pengaruh cuaca TR.2 Vandalis me												
	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	TC.1 Rusak karena pengaruh cuaca TC.2 Vandalis me												
	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumso sebagai daya tarik wisata kuliner	TK.1 Klaim atas Sambel Pecel TK.2 Mudah kedaluarsa												
	Rebranding Hotel di Kota Madiun	TH.1 menjamurnya rumah kos												



Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	TB.1 Persaingan antar daerah produsen batik												
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analisis Gap Smart Living

TOWS MATRIX - SMART LIVING KOTA MADIUN 2019	Strength				Weakness			
	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH
	SK.1 Pemerintah Daerah memiliki Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan penyelenggaraan TIBUMTRANMAS serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)	SE.1 Akses cukup SE.2 Penanganan banjir sudah memadai SE.3 Sanitasi sudah ODF,80 persen jambanisasi tinggal 50 kk tahun ini SE.4 Pengelolaan sampah sudah ada satgas dan bank sampah yang memadai (SS.1 Kesadaran masyarakat untuk berobat bagus SS.2 Manajerial sudah bagus SS.3 Modal cukup yang pendanaan dari pemerintahan APBD, DBHCHT, DAK, Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan (BK Provinsi)	SM.1 Ketersediaan angkutan umum sudah baik, baik konvensional maupun online	WK.1 Jumlah Aparatur Negara Sipil yang menyelenggarakan penegakan PERDA dan TIBUMTRANMAS sangat terbatas dan kurang	WE.1 Penanganan sampah overload dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam penanganan sampah masing masing WE.2 RTH masih kurang dan keindahan perlu ditingkatkan WE.3 Rumah kos membuat kurang nyaman WE.4	WS.1 Kurangnya perilaku hidup sehat dari masyarakat WS.2 Digital Kurang WS.3 Kurang prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat	WM.1 Anggaran Kurang, sehingga perencanaan yang ada tak terlaksana (Capital Lemah) WM.2 Pemeliharaan sudah bagus tetapi perlengkapan kurang WM.3 Transportasi umum kekurangannya di Angkot tetapi Transportasi



			masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan SK.3 Adanya prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan pelayanan penyelenggaraan TIBUMTRANS SK.4 Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang penyelenggaraan TIBUMTRANS	memenuhi standard)				Enforcementnya kurang WE.5 Manajerial kurang WE.6 Dana pengelolaan sampah mahal	online sudah lebih dari cukup WM.4 Kinerja Ruas Jalan Nasional semakin menurun WM.5 Banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor) WM.6 Tingkat disiplin lalu lintas kurang
Opportunity	KEAMANAN	OK.1 Masyarakat kota Madiun yang ramah OK.2 Ada sinergisitas 3 pilar, yaitu Pemerintah Daerah, TNI dan Polri OK.3 Adanya	Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan [SK.2, SK.3, SK.4 - OK.3, OK.5]						



		jimpitan pada saat ronda malam sebagai modal untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan OK.4 Angka kejahatan di kota Madiun yang relatif kecil OK.5 Adanya perguruan pencak silat yang berpusat di kota Madiun							
	KENYAMANAN	OE.1 Adanya Komitmen BUMN dan pelaku usaha dalam pembangunan RTH					Meningkatkan Kualitas Permukiman [WE.2, WE.3 - OE.1]		
	SEHAT	OS.1 Adanya forum peduli kesehatan yang bermitra dengan PKK, Organisasi profesi, LSM peduli kesehatan, institusi pendidikan			Memperluas Akses Pelayanan dan Informasi Layanan Kesehatan [SS.1, SS.3 - OS.1]			Mewujudkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) [WS.1 -	



		kehatan, dll							OS.1]	
	MOBILITY STRENGTH	OM.1 Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan instansi terkait OM.2 Adanya forum keselamatan di tingkat pelajar dan masyarakat OM.3 Tersedianya angkutan umum sekolah gratis (bus dan angkot)								Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat [WM.3 - OM.1, OM.2, OM.3]
Threat	KEAMANAN	TK.1 Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai kesadaran dalam menciptakan keamanan lingkungan TK.2 Madiun sebagai kota transit sehingga berpotensi untuk rawan gangguan keamanan TK.3 Adanya potensi konflik internal di perguruan pencak silat dan	Mewujudkan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu [SK.2, SK.3 - TK.1, TK.2, TK.3]							



		antar perguruan pencak silat.								
	KENYAMANAN	TE.1 Kepedulian Masyarakat dalam pemeliharaan RTH kurang TE.2 Belum adanya investor dalam pengelolaan sampah TE.3 Prilaku masyarakat dalam memproduksi sampah plastik yang masih tinggi								
	SEHAT	TS.1 Perkembangan penyakit tidak menular yang semakin meningkat TS.2 Banyaknya penjual makanan siap saji yang tidak sehat								
	MOBILITY STRENGTH	TM.1 Perkembangan teknologi transportasi yang cepat TM.2 Meningkatnya				Mengoptimalkan Sistem Manajemen Transportansi [SM.1 - TM.1, TM.2]				



		jumlah kepemilikan kendaraan pribadi							
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Analisis Gap Smart Society

TOWS MATRIX - SMART SOCIETY KOTA MADIUN 2019	Strength			Weakness		
	Komunitas	Pendidikan	Keamanan	Komunitas	Pendidikan	Keamanan
	SK.1 Terbentuknya komunitas hobby, profesi, pemerhati, relawan social, dll secara terstruktur.	SP.1 jumlah perguruan tinggi di madiun cukup banyak SP.2 Madiun menjadi tempat pendidikan yang diminati oleh daerah sekitar Kota Madiun SP.3 dukungan dari pemerintah daerah untuk pendidikan sangat besar SP.4 terdapat banyak sumber belajar di kota madiun SP.5 terdapat banyak dunia usaha dan dunia industri di kota madiun SP.6 terdapat	SE.1 pusat data kependudukan yang valid SE.2 SDM bidang keamanan yang cukup SE.3 system keamanan yang cukup (institusi)	WK.1 Belum ada prestasi yang menonjol, yang mencerminkan basic komunitas WK.2 Usia produktif lebih sedikit dalam berpartisipasi	WP.1 kualitas perguruan tinggi di madiun belum ada yang bertaraf nasional WP.2 kualitas pendidikan kota madiun belum stabil WP.3 pemanfaatan dukungan dari pemerintah daerah belum terserap secara maksimal WP.4 lembaga pendidikan dan masyarakat belum memanfaatkan sumber belajar secara maksimal WP.5 keberadaan dunia usaha dan industri belum dimanfaatkan sebagai mitra dunia pendidikan secara	WE.1 ketergantungan terhadap pemerintah pusat di data kependudukan WE.2 Gesekan kepentingan antar SDM keamanan WE.3 kinerja PPSI belum optimal



		<p>perpustakaan umum dan taman baca dengan pelayanan yang cukup lengkap di kota madiun</p> <p>SP.7 terdapat titik akses internet di hampir semua tempat di kota madiun</p> <p>SP.8 ada pusat informasi untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun</p> <p>SP.9 pengelolaan informasi dan data sudah cukup baik</p> <p>SP.10 ada upaya untuk melayani difabel di kota madiun</p> <p>SP.11 adanya pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan</p> <p>SP.12 adanya angkutan siswa gratis</p> <p>SP.13 Banyak anak atau remaja</p>			<p>maksimal</p> <p>WP.6 keberadaan perpustakaan dan taman baca belum mendukung secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan kota madiun</p> <p>WP.7 akses internet di hampir semua tempat di kota madiun belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan</p> <p>WP.8 pusat informasi yang ada belum dimanfaatkan untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun</p> <p>WP.9 pengelolaan informasi dan data kurang efektif dan rapi</p> <p>WP.10 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di kota madiun belum maksimal</p> <p>WP.11 pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan</p>	
--	--	--	--	--	---	--



				Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa SP.14 Pemerintah kota menerbitkan peraturan terkait pendidikan			kecamatan belum dimanfaatkan masyarakat WP.12 angkutan siswa gratis belum dimanfaatkan maksimal WP.13 Banyak anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa belum ditangani secara optimal WP.14 peraturan terkait pendidikan belum tersampaikan secara cepat dan merata	
Opportunity	Komunitas	OK.1 Sumber daya manusia yang cukup dan peduli OK.2 Display dari yang sudah berprestasi.	Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi [SK.1 - OK.1, OK.2]					
	Pendidikan	OP.1 Tren teknologi pendidikan kian beragam OP.2 Gaya belajar anak yang dinamis OP.3 Meningkatnya kesadaran orang tua untuk pendidikan anak OP.4 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ruang untuk orang dengan kebutuhan khusus					Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak [WP.2, WP.13 - OP.1, OP.2, OP.3] Meningkatkan Kualitas Fasilitas Belajar [WP.6, WP.7, WP.9, WP.10 - OP.4]	



	Keamanan	OE.1 keamanan dan ketertiban di masyarakat lebih baik OE.2 terciptanya kerukunan masyarakat yang kuat OE.3 pencegahan kriminalitas OE.4 kemasan wisata budaya dan SDM keamanan			Menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat yang Dinamis [SE.1, SE.2, SE.3 - OE.1, OE.2, OE.3]		
Threat	Komunitas	TK.1 antar komunitas ada gap/pembatas, benturan TK.2 kurangnya interaksi social karena kemajuan teknologi komunikasi	Meningkatkan Sinergi Antar Instansi serta Kelompok Masyarakat [SK.1 - TK.2]				
	Pendidikan	TP.1 Sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan perguruan tinggi bertaraf nasional/internasional masih sangat jauh dari ideal TP.2 kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kota madiun belum merata kualitas SDM dan sarpras belum merata TP.3 kesadaran lembaga pendidikan dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber belajar masih rendah TP.4 kesadaran dunia pendidikan dan dunia usaha dan industri untuk		Menguatkan Sektor Pendidikan Informal [SP.4, SP.6, SP.7, SP.8, SP.10. SP.11 - TP.4]		Mewujudkan Fasilitas Pendidikan yang Unggul [WP.2 - TP.1, TP.2]	



	<p>berkerjasama masih rendah</p> <p>TP.5 kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan perpustakaan dan taman baca masih rendah</p> <p>TP.6 Masyarakat belum tahu dan belum sadar cara pemanfaatan internet untuk meningkatkan kegiatan pendidikan</p> <p>TP.7 belum ada kerjasama pemanfaatan pusat informasi yang ada untuk mendukung dunia pendidikan kota madiun</p> <p>TP.8 pengelolaan informasi dan data belum ditata secara efektif dan rapi dengan memanfaatkan IT yang ada</p> <p>TP.9 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di kota madiun belum maksimal</p> <p>TP.10 Kesadara masyarakat untuk memanfaatkan Pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan belum maksimal</p> <p>TP.11 keengganan orang tua dan kemauan siswa</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>untuk memanfaatkan angkutan siswa gratis masih rendah</p> <p>TP.12 Belum ada program dari pihak terkait untuk menangani anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa</p> <p>TP.13 Proses pembuatan dan sosialisasi peraturan terkait pendidikan belum tersampaikan secara cepat dan merata</p>					
	Keamanan	TE.1 Benturan kekuatan antar SDM Keamanan					

Analisis Gap Smart Environment

TOWS MATRIX - SMART ENVIRONMENT KOTA MADIUN 2019	STRENGTH				WEAKNES			
	PROTECTION	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)	ENERGY	PROTECTION	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)	ENERGY
	SP.1 Adanya sumur resapan SP.2 Sudah adanya Perda IMB yang mengatur luasan lahan SP.3 Sudah	SW.1 Ketersediaan TPS sementara yang telah terbagi di beberapa titik SW.2 Armada angkut dan	SC.1 Sudah ada perda yang mengatur untuk ijin IPAL bagi usaha industri SC.2 Telah	SE.1 Pasokan Listrik stabil SE.2 Pemakaian lampu hemat energi SE.3 Ketersediaan anggaran	WP.1 Kurangnya sosialisasi tentang perlindungan lingkungan hidup WP.2	WW.1 Belum ada perda dari sumber (rumah) ke TPS WW.2 TPA sudah Overload WW.3	WC.1 Banyak usaha industri yang belum memiliki pengelolaan limbah (IPAL)	WE.1 Belum menerapkan real mettery (PLN), berapapun pemakaiannya, tagihan masih menggunakan



			adanya Perda tentang RTH	SDM yang cukup SW.3 Pengelolaan anggaran cukup baik SW.4 Sudah ada perda yang mengatur Retribusi SW.5 Pemanfaatan sampah organik untuk pupuk kompos SW.6 pemanfaatan gas metan hasil pengolahan sampah	tersedia komunal (IPAL)	yang cukup	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengelolaan sampah belum sanitary (masih control land fill) WW.4 Kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah masih kurang WW.5 Perilaku masyarakat yang belum menerapkan PK5 WW.6 Belum adanya penerapan teknologi pengelolaan sampah di masyarakat	WC.2 Pengawasan pembuangan limbah masih kurang WC.3 Belum ada perda yang mengatur untuk limbah domestic (rumah tangga)	an flat tarif. WE.2 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hemat energi
OPORTUNITI	PROTEKSI	OP.1 Adanya kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan	Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau [SP.3 - OP.3]				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup [WP.1, WP.2 - OP.1, OP.3, OP.4]			



		<p>pengelolaan lingkungan (bersih desa, tanam pohon) OP.2 Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penelitian pencegahan pencemaran limbah dan sampah OP.3 Peran serta ORMAS dan masyarakat sebagai pekerja sosial komunitas berbasis lingkungan OP.4 Pemanfaatan teknologi untuk</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		monitoring kualitas air dan udara							
	WASTE (SAMPAH PADAT)	OW.1 Adanya bank sampah OW.2 Sumber energi alternative dari pengelolaa n sampah OW.3 Daur ulang sampah plastic (potensi ekonomi)							
	WASTE (LIMBAH CAIR)	OC.1 Penerapan teknologi pengolahan air (limbah cair) OC.2 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaa n limbah	Mengoptimal kan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga [SW.2 - OC.2]	Menegakk an Peraturan Terkait Ijin Lingkungan Pada Industri [SC.1, SC.2 - OC.1]			Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Sekolah, Kantor, dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah [WW.4, WW.5 - OC.2]	Meningkatk an Pengendali an Kualitas Udara [WC.1, WC.2 - OC.1]	



	ENERGY	OE.1 Pengelolaan sampah menjadi sumber energi alternative OE.2 Pembangunan tiang PJU dekoratif (untuk estetika, penghematan anggaran, kerapian, smart living & branding)				Mengoptimalkan Penggunaan Listrik [SE.2, OE.2]			Menciptakan Energi Alternatif Terbarukan [WE.1 - OE.1]
THREAT	PROTECTION	TP.1 Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian TP.2 Pertumbuhan jumlah penduduk yang	Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air [SP.1 - TP.1]				Mengembangkan Keseimbangan Lingkungan [WW.2 - TP.2]		
			Menciptakan Pengelolaan Bencana Banjir yang Responsif [SP.2, SW.1, SW.5, SW.6 - TP.2]						



		meningkat berbanding lurus dengan volume sampah							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bab 4

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY



**Smart City
Kota Madjuri**

Bab 4

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY



Analisis Visi Pembangunan *smart city* bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi *smart city* daerah sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan *smart city* di daerah. Visi dan misi *smart city* daerah haruslah memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
3. Harapan warga masyarakat;
4. Analisis Faktor eksternal di masa depan;

Untuk menyusun sebuah visi *smart city* daerah, terdapat kriteria suatu rumusan visi *smart city*, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction);
2. Menjawab permasalahan pembangunan *Smart City* daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative);
4. Disertai penjelasan mengapa visi *Smart City* tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah dan nasional.

Sedangkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan memiliki sifat sebagai berikut :

1. *Imaginable*, dapat dibayangkan oleh semua stakeholders;
2. *Desirable*, memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan;
3. *Feasible*, Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada;
4. *Focussed*, memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan;



5. *Flexible*, dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman;
6. *Communicable*, dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku; dan *Incisive*, dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang tajam, singkat, jelas dan padat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut.

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024: “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”	
Pokok-Pokok Visi	MISI
Bersih Berwibawa	Misi ke- 1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi ke- 2: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Sejahtera	Misi ke- 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misi ke- 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Kota Madiun memiliki motto “PENDEKAR” Pintar Melayani Membangun Peduli Terbuka Karismatik yang sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Daerah yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sementara itu, sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang



dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

4.1. Sasaran Smart City Daerah

Sasaran Smart Governance

Sasaran : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

<p>a. Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat 2. G2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat 3. G3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok
<p>b. Manajemen Birokrasi (<i>Bureaucracy Management</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G4. Menciptakan Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency).
<p>c. Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G5. Mengambil kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat 2. G6. Mengembangkan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Sasaran Smart Economy

Sasaran : mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Tujuan: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

<p>a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (<i>industry</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E1. Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai.
<p>b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (<i>welfare</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E2. Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)
<p>c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>)</p>



1. **E3.** Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (financial literate) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu

Sasaran Smart Branding

Sasaran : Peningkatan daya saing daerah dengan pengembangan budaya kearifan local untuk penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional.

Tujuan: Peningkatan daya saing daerah dengan pengembangan budaya kearifan local untuk penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. B1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination). 2. B2. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan 3. B3. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung
b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. B4. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif
c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. B5. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

Sasaran Smart Society

Sasaran : mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

Tujuan: Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (<i>Community</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. S1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah 2. S2. Mengembangkan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif
b. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (<i>Learning</i>) dan Komprehensif



<ol style="list-style-type: none"> 1. S3. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable. 2. S4. Membangun platform edukasi bagi masyarakat
<p>c. Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat (<i>Security</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S5. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

Sasaran Smart Living

Sasaran : mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.

Tujuan: Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

<p>a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L1. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).
<p>b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L2. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport)
<p>c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L3. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

Sasaran Smart Environment

Sasaran : mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri.

Tujuan: Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (*Medium Health and Comfort City*)

Yang dapat didetailkan sebagai **sasaran-sasaran** sebagai berikut:

<p>a. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EN1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara sertamengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT) 2. EN2. Membangun ruang terbuka hijau 3. EN3. Mengembangkan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi 4. EN4. Mengendalikan polusi udara
<p>b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah (<i>Waste</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EN5. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga



(household)
2. EN6. Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (industrial)
3. EN7. Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>)
4. EN8. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.
c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)
1. EN9. Memanfaatkan energi yang efisien dan bertanggungjawab
2. EN10. Mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

4.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan Daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- Misi ke- 1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
- Misi ke- 2: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Misi ke- 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
- Misi ke- 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat

Kesejahteraan masyarakat Kota Madiun Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI** dan **TERBUKA** yang **KARISMATIK**.

Visi dan Misi yang dicanangkan Walikota harus dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Madiun. Tantangan tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi kota Madiun sebesar 5,96, sedangkan untuk tingkat provinsi sebesar 5,40 dan tingkat nasional sebesar 5,27.
2. PDRB ADHB sebesar 12.209,10 milyar rupiah.
3. PDRB ADHK sebesar 9.488,07 juta rupiah.
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,85%.
5. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 80,15.
6. Tingkat inflasi sebesar 2,11.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan, serta mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai



penjabaran strategi. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Kota Madiun periode 2019-2024 adalah sebagai berikut.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019

Tahun 2019 adalah fase **konsolidasi untuk implementasi PANCA KARYA dalam mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**. Pada tahap ini Program 100 Hari dari Kepala Daerah terpilih diselaraskan dengan Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi KDH periode sebelumnya.

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2020

Pada tahun 2020 ini fokus pada PANCA KARYA harus sudah dimunculkan dalam Tema **“Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pertumbuhan Yang Berkualitas”**. Karena itu hasil penjabaran tiap misi KDH terpilih dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus dan lokus dari PANCA KARYA.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2021

Pada tahun 2021 ini fokus arah kebijakan PANCA KARYA adalah pada **Penguatan Good Governance untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan**. Aspek good governance ditonjolkan untuk memastikan adanya kemandirian ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Pada Tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Pada tahun 2022 ini fokus dari arah kebijakan adalah **Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan**. Pada tahun 2022 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja Kebijakan PANCA KARYA untuk mewujudkan Visi Kota Madiun periode 2019-2024.

4.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2023

Tahun 2023 ini adalah tahap **Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan**. Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal.

4.2.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Tahun 2024 adalah fase **Konsolidasi Transisi Kebijakan PANCA KARYA untuk keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun**. Hasil dari Kebijakan PANCA KARYA dikonsolidasi sebagai sebagai pondasi pembangunan pembangunan periode berikutnya.



Tabel 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Konsolidasi implementasi PANCA KARYA untuk mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan <i>Good Governance</i> untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan	Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan	Konsolidasi Transisi Kebijakan PANCA KARYA untuk keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Pada tahun 2019 ini, fokus dari kebijakan adalah pembangunan dasar-dasar untuk pencapaian Visi Daerah dalam tiap Misi Pembangunan Daerah	Pada tahun 2020 ini, hasil penjabaran tiap misi dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus dan lokus dari PANCA KARYA.	Pada Tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pada tahun 2022 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian target kinerja RPJMD.	Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal.	Tahun 2024 ini ini adalah konsolidasi dan transisi kebijakan PANCA KARYA sebagai pondasi pembangunan periode berikutnya.



4.2.7. Program Pembangunan Kota Madiun

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Program Pembangunan Oleh OPD

No	Program	OPD
Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)		
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	
3	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
8	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
10	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Sekretariat OPD
11	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	
12	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
14	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	
15	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
16	Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
18	Program Penataan Aparatur	
19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	
21	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Kecamatan
22	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Admonistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah



No	Program	OPD
23	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	
24	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
25	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
26	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	
27	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	
29	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	
30	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah
31	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	
32	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	
Misi : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat		
33	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Kecamatan
35	Program Dana Kelurahan	
Misi : Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Terhadap Kinerja Dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintahan		
36	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	Program Sosialisasi di Bidang Cukai (DBHCHT)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
39	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
Misi : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun		
40	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah
41	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	
42	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan (DBHCHT)	
43	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
44	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	
45	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	
46	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
47	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
48	Program Pendidikan Dasar	
49	Program Pendidikan Anak Usia Dini	



No	Program	OPD
50	Program Pendidikan non Formal	
51	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
52	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
54	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	
55	Program Pengendalian Banjir	
56	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
57	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
58	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
59	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
60	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
61	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
62	Program Pelayanan Pertanahan	
63	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
64	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
65	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
66	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
Misi : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun		
67	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
68	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan KetenagaKerjaan	
69	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	
70	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
71	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	
72	Program Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja
73	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Sekretariat Daerah
74	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	
75	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi (DBHCHT)	
76	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha



No	Program	OPD
77	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Mikro
78	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
79	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan
80	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	
81	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	
82	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Tenaga Kerja
83	Program Pembinaan Industri (DBHCHT)	
84	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
85	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	
86	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
87	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	
88	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
89	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	
90	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
91	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
92	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Sekretariat Daerah
93	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
94	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	
95	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	
96	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja
97	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
98	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
99	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
100	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana
101	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan	Kecamatan



No	Program	OPD
	Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	



